



# **DOKUMEN RANCANGAN AKHIR**

# **RENSTRA SETDA 2024-2026**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH  
JL. PAHLAWAN NO.9 TELP. 8311174  
(20 SALURAN) FAX. 8311266  
SEMARANG**

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel.....	ii
Lembar Pernyataan.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika .....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH           PROVINSI JAWA TENGAH .....</b>	<b>7</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	7
2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah .....	53
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah .....	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah .....	41
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT           DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH .....</b>	<b>43</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	43
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	54
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>57</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Provinsi Jawa Tengah .....	57
4.2 Manajemen Resiko Sekretariat Daerah.....	60
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>62</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA           PENDANAAN.....</b>	<b>64</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>91</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	26
Tabel	2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Peayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provnsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 .....	40
Tabel	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	44
Tabel	3.2	Telaah Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	54
Tabel	3.3	Telaah Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota.....	55
Tabel	3.4	Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD.....	56
Tabel	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	59
Tabel	4.2	Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Resiko Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.....	61
Tabel	5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026.....	63
Tabel	6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 .....	65
Tabel	7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 .....	92
Tabel	7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD .....	94

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta berkomitmen untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Tahun 2024-2026 dengan menggunakan sumbu daya organisasi secara efektif dan efisien.

Semarang, 9 Mei 2023

**a.n. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Kepala Biro Administrasi  
Pembangunan Daerah



**ENDI FAIZ EFFENDI, S.Pi, MA**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710909 199603 1 006

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Mendasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB) dan menimbang masa jabatan Gubernur Jawa Tengah yang akan berakhir pada tahun 2023, maka disusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Perangkat Daerah menyusun dokumen Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 sebagai penjabaran RPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026. Renstra tersebut sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan sekaligus penjabaran atas pembangunan jangka menengah daerah di lingkup Sekretariat Daerah. Renstra Sekretariat Daerah menyajikan tiga aspek utama, yaitu sasaran yang hendak dicapai; strategi dan arah kebijakan pencapaiannya; serta perumusan program dan kegiatan. Dokumen Renstra Sekretariat Daerah kemudian akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026 dilakukan melalui proses identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah; penerjemahan kewenangan melalui tugas dan fungsi Setda sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Tahun 18 Tahun 2016, Permendagri Nomor 56 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah maka dirumuskan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan; serta penetapan target kinerja dan proyeksi kebutuhan pendanaanya.

Renstra Sekretariat Daerah memandang kualitas kebijakan daerah sebagai fokus dan target transformasi yang strategis pada tahun 2024-2026. Peningkatan kualitas kebijakan pada seluruh urusan pembangunan daerah akan meningkatkan kualitas proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil-hasil pembangunan daerah. Hal tersebut, diharapkan mampu meningkatkan peran Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan daerah.

### 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PerundangUndangan;
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
17. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan pedoman bagi seluruh Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun 2024-2026 ini dimaksudkan untuk:

- 1). Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 2). Mendorong tercapainya sasaran pembangunan khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 3). Mengetahui hal-hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Tujuan dan Sasaran.
- 4). Sebagai acuan penerapan strategi dan arah kebijakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
- 5). Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di masing-masing Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

#### b. Tujuan

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Tujuan disusunnya Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1). Sebagai alat sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan antara RPD Provinsi Jawa Tengah dengan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.
- 2). Sebagai dasar menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 3). Sebagai dasar pengukuran kinerja sampai dengan akhir pelaksanaan Renstra 2024-2026 bagi Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 4). Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* terkait untuk melakukan pengawasan atas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 5). Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistem pemerintahan daerah yang memperhatikan kerangka regulasi dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja.

## 1.4. Sistematika

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang mengemukakan pengertian Renstra Sekretaris Daerah, fungsi Renstra Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Sekretaris Daerah, keterkaitan Renstra Sekretaris Daerah dengan RPD, dan dengan Renja Sekretaris Daerah.
- 1.2. Landasan Hukum  
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Sekretaris Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretaris Daerah.
- 1.3. Maksud dan Tujuan  
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Sekretaris Daerah.
- 1.4. Sistematika Penulisan  
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Sekretaris Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

### BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas sumber daya yang dimiliki Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Sekretaris Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Sekretaris Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2018-2023, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Sekretaris Daerah ini.

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretaris Daerah  
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Sekretaris Daerah, struktur organisasi Sekretaris Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Sekretaris Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Sekretaris Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Sekretaris Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2. Sumber Daya Sekretaris Daerah, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Sekretaris Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretaris Daerah, bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretaris Daerah



berdasarkan sasaran/target Renstra Sekretaris Daerah periode sebelumnya, dan indikator kinerja pelayanan Sekretaris Daerah.

- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah. Subbab ini mengemukakan macam pelayanan, sebagai wujud tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah yang merupakan representasi masing-masing biro lingkup Sekretariat Daerah.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretaris Daerah. Subbab ini berisi tentang permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan dalam dokumen ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan Sekretaris Daerah sesuai dengan tupoksinya.

#### 3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Sekretaris Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Sekretaris Daerah ditinjau dari:

- a. Gambaran pelayanan Sekretaris Daerah;
- b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- c. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Sekretaris Daerah; dan
- e. Implikasi KLHS bagi pelayanan Sekretaris Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini disajikan informasi tentang isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Sekretaris Daerah.

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretaris Daerah

Pada bagian ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretaris Daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 3 (tiga) tahun kedepan. Adapun cara merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut.

##### a. Tujuan Sekretaris Daerah

Tujuan Sekretaris Daerah merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam satu periode tertentu dan dirumuskan secara spesifik dan realistis serta dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis Sekretaris Daerah. Tujuan Sekretaris Daerah menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi Sekretaris Daerah. Tujuan merupakan *ultimate outcome* dari Sekretaris Daerah yang akan dicapai dalam tiga tahun kedepan. Perumusan tujuan dilakukan dengan mengambil intisari dari pernyataan isu,

permasalahan, dan peluang menjadi kalimat positif yang ringkas.

b. Sasaran Sekretaris Daerah

Sasaran Sekretaris Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran mendasarkan pada tugas dan fungsi Sekretaris Daerah yang dijabarkan dalam program dan kegiatan pada biro-biro lingkup Sekretariat daerah. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *intermediate outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Sekretaris Daerah akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Sekretaris Daerah. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Dalam merumuskan strategi dilakukan melalui metode analisis SWOT. Strategi yang disusun bersifat operasional, yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan Sekretariat daerah yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat daerah.

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Sekretaris Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Sekretaris Daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris Daerah. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU Sekretaris Daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Sekretaris Daerah merujuk pada indikator program pada Bab V.

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidahkaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II  
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas dan Fungsi

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Perangkat Gubernur serta pelayanan administratif. Guna melaksanakan tugas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur;
- 5) Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga Asisten Sekda, yaitu: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Asisten Ekonomi dan Pembangunan; dan Asisten Administrasi.

Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu SEKDA dalam pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur di bidang pemerintahan dan hukum, pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama, Biro Hukum dan Biro Kesejahteraan Rakyat, serta Perangkat Daerah lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- 1) Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, hukum dan kesejahteraan rakyat serta Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, hukum dan kesejahteraan rakyat serta Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- 3) pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan

- kerjasama, hukum dan kesejahteraan rakyat serta Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur di bidang pemerintahan dan hukum;
  - 5) pengoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, hukum dan kesejahteraan rakyat serta Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; dan
  - 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh SEKDA.

Asisten Ekonomi Dan Pembangunan mempunyai tugas, membantu SEKDA dalam pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur di bidang Ekonomi Dan Pembangunan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN pada Biro Perekonomian, Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam, dan Biro Administrasi Pengadaan Barang/ Jasa serta Perangkat Daerah lingkup ekonomi dan pembangunan. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- 1) Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang perekonomian, infrastruktur dan sumber daya alam, dan administrasi Pengadaan Barang/ Jasa serta Perangkat Daerah lingkup ekonomi dan pembangunan;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, infrastruktur dan sumber daya alam, dan administrasi Pengadaan Barang/ Jasa serta perangkat daerah lingkup ekonomi dan pembangunan;
- 3) Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perekonomian, infrastruktur dan sumber daya alam, dan administrasi Pengadaan Barang/ Jasa serta Perangkat Daerah lingkup ekonomi dan pembangunan;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur di bidang ekonomi dan pembangunan;
- 5) Pengoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perekonomian, infrastruktur dan sumber daya alam, dan administrasi Pengadaan Barang/ Jasa serta Perangkat Daerah lingkup ekonomi dan pembangunan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh SEKDA

Asisten Administrasi mempunyai tugas, membantu SEKDA dalam pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur di bidang organisasi, pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Biro Organisasi, Biro umum dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah serta Perangkat Daerah lingkup administrasi. Asisten Administrasi mempunyai fungsi:

- 1) Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah di bidang organisasi umum dan administrasi pembangunan daerah serta perangkat daerah lingkup administrasi;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang organisasi, umum dan administrasi pembangunan daerah serta perangkat daerah lingkup administrasi;
- 3) Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi, umum dan administrasi pembangunan daerah serta perangkat daerah lingkup administrasi;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur lingkup administrasi;
- 5) Pengoordinasian pelayanan administrasi dan pembinaan ASN di bidang organisasi, umum dan administrasi pembangunan daerah serta perangkat daerah lingkup administrasi; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh SEKDA.

Guna pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang dibentuk sembilan Biro yang dikepalai oleh Kepala Biro. Tugas dan Fungsi Biro-biro lingkup Sekretariat Daerah.

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja sama mempunyai tugas, melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja sama mempunyai Fungsi:

- 1) Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang Pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi Pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Pemerintahan;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi sekretariat perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- 6) Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.

Tugas Biro Hukum yaitu melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum, Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang

perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum. Biro Hukum mempunyai Fungsi:

- 1) Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum;
- 5) Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Biro Kesejahteraan Rakyat melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Kesejahteraan Rakyat, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah Raga. Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai Fungsi:

- 1) Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah raga;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah Raga;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah Raga;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Kesejahteraan Rakyat;

- 5) Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan sumber daya ASN di bidang keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah raga; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Biro Perekonomian melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Perekonomian, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan Badan Usaha Milik Daerah, serta perhubungan, penanaman modal dan pariwisata. Biro Perekonomian mempunyai Fungsi:

- 1) Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah Badan Usaha Milik Daerah, perhubungan, penanaman modal dan pariwisata;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi usaha kecil dan menengah, perhubungan, penanaman modal dan pariwisata;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah, perhubungan, penanaman modal dan pariwisata;
- 4) Membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang perekonomian;
- 5) Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah, perhubungan, penanaman modal dan pariwisata;
- 6) Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya manusia badan usaha milik daerah; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi Dan Pembangunan.

Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang infrastruktur dan sumber daya alam, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian. Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam mempunyai Fungsi:

- 1) Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;
- 3) Membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang infrastruktur dan sumber daya alam;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;
- 5) Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi Dan Pembangunan.

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa menyusun pengoordinasian penyusunan kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang administrasi Pengadaan barang/jasa, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang administrasi Pengadaan barang/jasa. Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai Fungsi:

- 1) Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/jasa, pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan Pengadaan barang/jasa, pengelolaan Sistem Pengadaan barang/jasa dan pembinaan dan advokasi Pengadaan barang/jasa;
- 3) Membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang administrasi Pengadaan barang/jasa;
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan Pengadaan barang/Jasa, pengelolaan Sistem Pengadaan barang/Jasa, dan pembinaan dan advokasi Pengadaan barang/jasa;
- 5) Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengelolaan Pengadaan barang/jasa,



pengelolaan sistem Pengadaan barang/jasa dan pembinaan dan advokasi Pengadaan barang/jasa; dan

- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Biro Organisasi melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Biro Organisasi mempunyai Fungsi:

- 1) Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi;
- 5) Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN dibidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi.

Biro Umum melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang rumah tangga Sekretariat Daerah, hubungan masyarakat dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan. Biro Umum mempunyai Fungsi:

- 1) Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang rumah tangga Sekretariat Daerah, hubungan masyarakat dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang rumah tangga Sekretariat Daerah, hubungan masyarakat dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang rumah tangga Sekretariat Daerah, hubungan masyarakat dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan;
- 4) Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang rumah tangga Sekretariat Daerah, hubungan masyarakat dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan; dan

- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Biro Administrasi Pembangunan Daerah melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Administrasi Pembangunan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan. Biro Administrasi Pembangunan Daerah mempunyai Fungsi:

- 1) Pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Administrasi Pembangunan Daerah;
- 5) Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi.

b. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Sekretaris Daerah membawahkan:

- 1).Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
  - a). Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja sama membawahkan:
    - (1). Bagian Pemerintahan, membawahkan:
      - (a). Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
      - (b). Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pertanahan;

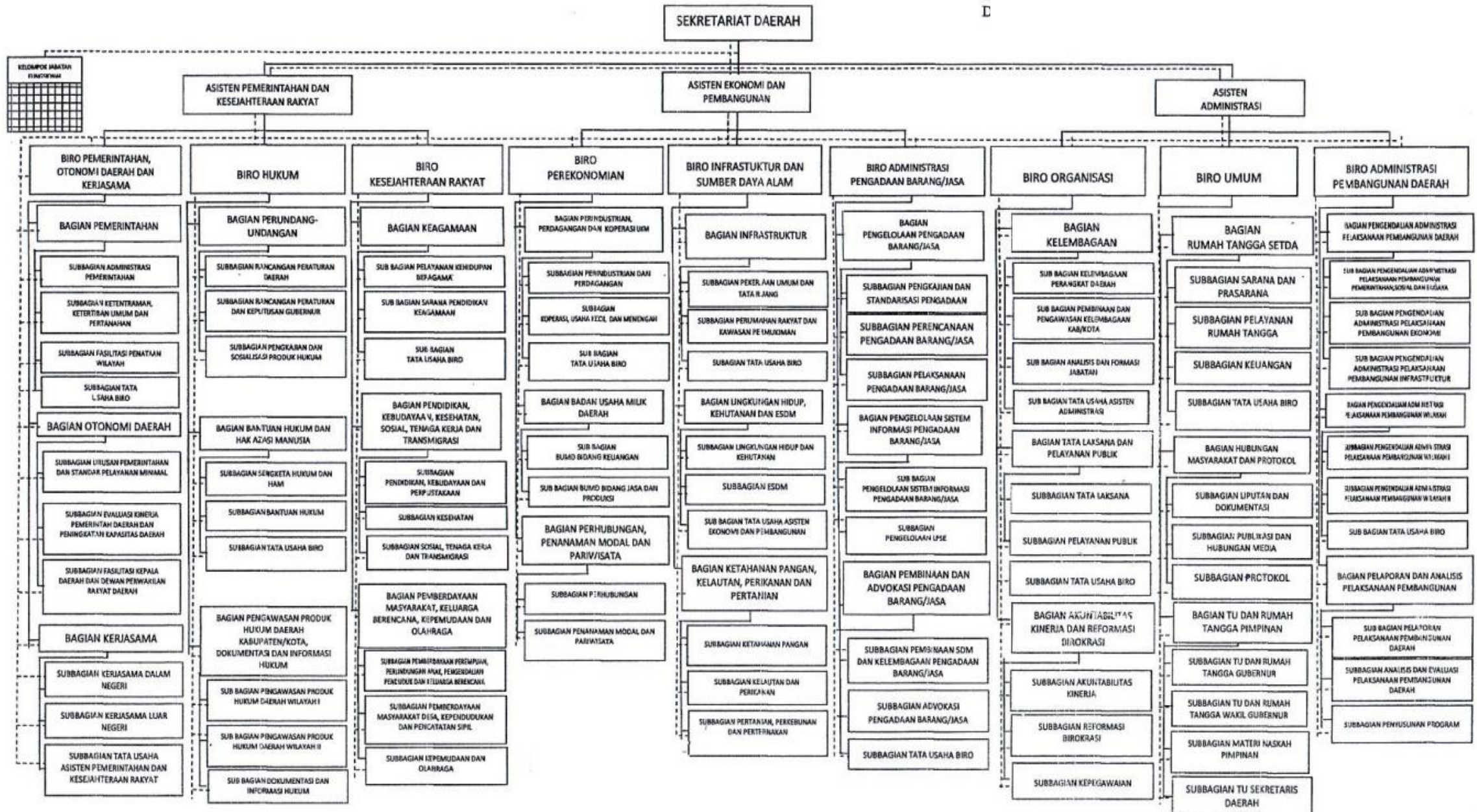
- (c). Sub Bagian Fasilitasi Penataan Wilayah; dan
- (d). Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (2). Bagian Otonomi Daerah, membawahkan:
  - (a). Sub Bagian Urusan Pemerintahan Dan Standar Pelayanan Minimal;
  - (b). Sub Bagian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Dan Peningkatan Kapasitas Daerah; dan
  - (c). Sub Bagian Fasilitasi Kepala Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3). Bagian Kerja sama, membawahkan:
  - (a). Sub Bagian Kerja sama Dalam Negeri;
  - (b). Sub Bagian Kerja sama Luar Negeri; dan
  - (c). Sub Bagian Tata Usaha Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.
- b). Biro Hukum, membawahkan:
  - (1). Bagian Perundang-undangan, membawahkan:
    - (a). Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah;
    - (b). Sub Bagian Rancangan Peraturan Dan Keputusan Gubernur; dan
    - (c). Sub Bagian Pengkajian Dan Sosialisasi Produk Hukum.
  - (2). Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan:
    - (a). Sub Bagian Sengketa Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
    - (b). Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
    - (c). Sub Bagian Tata Usaha Biro.
  - (3). Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, Dokumentasi Dan Informasi Hukum, membawahkan:
    - (a). Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah I;
    - (b). Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah II; dan
    - (c). Sub Bagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum.
- c). Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
  - (1). Bagian Keagamaan, membawahkan:
    - (a). Sub Bagian Pelayanan Kehidupan Beragama;
    - (b). Sub Bagian Sarana Pendidikan Keagamaan; dan
    - (c). Sub Bagian Tata Usaha Biro.
  - (2). Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, membawahkan:
    - (a). Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan Dan Perpustakaan;
    - (b). Sub Bagian Kesehatan; dan
    - (c). Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.
  - (3). Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan Dan Olah Raga, membawahkan:
    - (a). Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
    - (b). Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; dan

- (c). Sub Bagian Kepemudaan Dan Olah Raga.
- 2). Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, membawahkan:
  - a) Biro Perekonomian
    - (1). Bagian Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahkan:
      - (a). Sub Bagian Perindustrian Dan Perdagangan;
      - (b). Sub Bagaian Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah; dan
      - (c). Sub Bagian Tata Usaha Biro.
    - (2). Bagian Badan Usaha Milik Daerah, membawahkan:
      - (a). Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah bidang Keuangan; dan
      - (b). Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah bidang Jasa Dan Produksi.
    - (3). Bagian Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata, membawahkan:
      - (a). Sub Bagian Perhubungan; dan
      - (b). Sub Bagian Penanaman Modal Dan Pariwisata
  - b) Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam, membawahkan :
    - (1). Bagian Infrastruktur, membawahkan:
      - (a). Sub Bagian Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang;
      - (b). Sub Bagian Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman; dan
      - (c). Sub Bagian Tata Usaha Biro.
    - (2). Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Energi Sumber Daya Mineral, membawahkan:
      - (a). Sub Bagian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
      - (b). Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
      - (c). Sub Bagian Tata Usaha Asisten Ekonomi Dan Pembangunan.
    - (3). Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan Dan Pertanian, membawahkan:
      - (a). Sub Bagian Ketahanan Pangan;
      - (b). Sub Bagian Kelautan Dan Perikanan; dan
      - (c). Sub Bagian Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan
  - c) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
    - (1). Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
      - (a). Sub Bagian Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan ;
      - (b). Sub Bagian Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
      - (c). Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
    - (2). Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
      - (a). Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa;
      - (b). Sub Bagian Pengelolaan LPSE; dan
    - (3). Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:

- (a). Sub Bagian Pembinaan SDM Dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - (b). Sub Bagian Advokasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - (c). Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- 3). Asisten Administrasi, membawahkan:
  - a). Biro Organisasi, membawahkan:
    - (1). Bagian Kelembagaan, membawahkan:
      - (a). Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah;
      - (b). Sub Bagian Pembinaan Dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota;
      - (c). Sub Bagian Analisis Dan Formasi Jabatan; dan
      - (d). Sub Bagian Tata Usaha Asisten Administrasi.
    - (2). Bagian Tata Laksana Dan Pelayanan Publik, membawahkan:
      - (a). Sub Bagian Tatalaksana;
      - (b). Sub Bagian Pelayanan Publik; dan
      - (c). Sub Bagian Tata Usaha Biro.
    - (3). Bagian Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi, membawahkan:
      - (a). Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja;
      - (b). Sub Bagian Reformasi Birokrasi; dan
      - (c). Sub Bagian Kepegawaian.
  - b). Biro Administrasi Pembangunan
    - (1). Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, membawahkan:
      - (a). Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial Dan Budaya;
      - (b). Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi; dan
      - (c). Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.
    - (2). Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, membawahkan:
      - (a). Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I;
      - (b). Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II; dan
      - (c). Sub Bagian Tata Usaha Biro.
    - (3). Bagian Pelaporan Dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan, membawahkan:
      - (a). Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
      - (b). Sub Bagian Analisis Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
      - (c). Sub Bagian Penyusunan Program.
  - c). Biro Umum
    - (1). Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah, membawahkan:
      - (a). Sub Bagian Sarana Dan Prasarana;
      - (b). Sub Bagian Pelayanan Rumah Tangga;

- (c). Sub Bagian Keuangan; dan
  - (d). Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- (2). Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol, membawahkan:
- (a). Sub Bagian Liputan Dan Dokumentasi;
  - (b). Sub Bagian Publikasi Dan Hubungan Media; dan
  - (c). Sub Bagian Protokol.
- (3). Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga Gubernur, membawahkan:
- (a). Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga Gubernur;
  - (b). Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga Wakil Gubernur;
  - (c). Sub Bagian Materi Naskah Pimpinan; dan
  - (d). Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah.

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah



## 2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dan pembangunan didukung sumberdaya antara lain:

### a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah PNS Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 525 Pegawai Negeri Sipil (data PNS per Desember 2022). Berdasar Jabatan/Eselom terdiri dari Eselon I sebanyak 1 orang, Struktural sebanyak 25 orang, Fungsional sebanyak 120 orang, dan Staf sebanyak 365 orang. Berdasarkan golongan, maka PNS Sekretariat Daerah terdiri dari golongan I sebanyak 4 orang, golongan II sebanyak 75 orang, golongan III sebanyak 353 orang dan golongan IV sebanyak 93 orang yang rata-rata mempunyai pengetahuan di bidang Pemerintahan, hukum, informatika, dan manajemen.

Secara rinci data PNS pada per Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel Komposisi PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Kondisi per 31 Desember Tahun 2022.



Tabel Komposisi PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Kondisi Bulan per 31 Desember Tahun 2022

No.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN						GOLONGAN KEPANGKATAN				JABATAN/ESELON				
		L	P	SMP	SMA	DIII	S1	S2	S3	I	II	III	IV	I	II	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	STAF
1	Sekretaris Daerah	1						1	0				1	1				
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1						1					1		1			
3	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	1						1					1		1			
4	Asisten Administrasi	0						0					0		1			
5	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja sama	21	25	0	3	0	25	18	0	0	1	33	12	0	0	2	11	32
6	Biro Hukum	23	18	0	2	2	26	11	0	0	3	31	7	0	0	2	15	24

No.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN						GOLONGAN KEPANGKATAN				JABATAN/ESELON				
		L	P	SMP	SMA	DIII	S1	S2	S3	I	II	III	IV	I	II	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	STAF
7	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	22	8	0	2	0	14	14	0	0	1	21	8	0	0	2	10	18
8	Biro Perekonomian	26	18	0	4	7	15	18	0	0	9	26	9	0	0	2	9	33
9	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	18	15	0	3	0	19	11	0	0	1	22	10	0	0	3	10	20
10	Biro Kesra	17	23	0	0	3	24	13	0	0	1	29	10	0	0	2	10	28
11	Biro Organisasi	27	23	0	2	3	28	17	0	0	2	36	12	0	0	3	11	36
12	Biro Umum	120	43	11	56	9	63	17	0	4	49	101	9	0	0	11	8	144
13	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa *)	57	18	0	4	7	44	19	1	0	8	54	13	0	0	7	36	30

No.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN						GOLONGAN KEPANGKATAN				JABATAN/ESELON				
		L	P	SMP	SMA	DIII	S1	S2	S3	I	II	III	IV	I	II	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	STAF
	JUMLAH	334	191	11	76	31	258	141	1	4	75	353	93	1	3	25	120	365

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Jateng, 31 Desember 2022

b. Sarana dan Prasarana Penunjang

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Setda Provinsi Jawa Tengah diperlukan sarana dan prasarana penunjang. Adapun sarana dan prasarana penunjang/aset yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak, sebagaimana tercantum pada tabel Rekapitulasi Aset Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel Rekapitulasi Aset Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

No.	KODE bidang BARANG	NAMA bidang BARANG	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
1	1.3.1.01	TANAH	15
2	1.3.2.01	ALAT BESAR	41
4	1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	299
5	1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	17
6	1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	-
7	1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	8.064
8	1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	1.620
9	1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	13
10	1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	2
	1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	8
11	1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	1.726
12	1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-
13	1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-
14	1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-
15	1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-
16	1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-
17	1.3.2.16	ALAT PERAGA	-
18	1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-
19	1.3.2.18	RAMBU RAMBU	-
20	1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	22
21	1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	44
22	1.3.3.02	MONUMEN	-
23	1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	-
24	1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-
25	1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	1
26	1.3.4.02	BANGUNAN AIR	-
27	1.3.4.03	INSTALASI	59
28	1.3.4.04	JARINGAN	-
29	1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	10.746
30	1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAAN/ KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	52
31	1.3.5.03	HEWAN	-
32	1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-
33	1.3.5.05	TANAMAN	-

34	1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-
35	1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-
36	1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-

*Sumber : Biro Umum Setda Prov. Jateng, 31 Desember 2022*

### 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Kinerja pelayanan OPD merupakan capaian kinerja OPD yang diperoleh dari perbandingan antara capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang semula ditargetkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut.

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2013-2018 sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(14)	(14)	(14)	(14)	(14)	(14)	(14)
Persentase Kebijakan yang Efektif				%	80	80	81	83	84	93.02	86.08	81	80.43	80	116%	108%	100%	97%	95%
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah				%	80	75	81	83	84	86.36	83.13	81	86.51	85	108%	111%	100%	104%	101%
Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda				%	75	76	76	78	79	75.63	77.50	76	Na	Na	101%	102%	100%	Na	Na
Nilai IKM Setda				%	Na	Na	Na	78	78.5	Na	Na	Na	85.75	78.5	Na	Na	Na	110%	100%
Nilai Sakip Setda				%	Na	Na	Na	73.77	73.97	Na	Na	Na	77.18	73.97	Na	Na	Na	105%	100%
Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi				%	85	85	85	85	85	100	100	85	Na	Na	118%	118%	100%	Na	Na
Prosentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi				%	85	85	85	85	85	100	100	85	Na	Na	118%	118%	100%	Na	Na
Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif				%	70	70	75	85	90	71	70	75	Na	Na	101%	100%	100%	Na	Na
Efektivitas Kebijakan bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah				%	Na	Na	Na	90	90	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	111%	111%
Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan				%	85	80	85	85	85	85.71	80.65	85	Na	Na	101%	101%	100%	Na	Na
Presentase peningkatan kualitas layanan keagamaan				%	Na	Na	Na	40	45	Na	Na	Na	42.86	45	Na	Na	Na	107%	100%
Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi				%	90	93	91	93	94	100	100	91	Na	Na	111%	108%	100%	Na	Na

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase efektifitas produk hukum daerah				%	Na	Na	Na	95	95	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	105%	105%
Persentase Efektivitas Penyelesaian Masalah Hukum				%	Na	Na	Na	95	95	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	105%	105%
Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi				%	81	87	87	93	94	100	100	87	Na	Na	123%	115%	100%	Na	Na
Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah				%	80	75	83	84	85	81	99	83	Na	Na	101%	133%	100%	Na	Na
Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah				%	Na	Na	Na	88	89	Na	Na	Na	91.97	92	Na	Na	Na	105%	103%
Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota				%	80	82	82	84	85	96.60	99	82	Na	Na	121%	121%	100%	Na	Na
Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan				%	80	81	82	83	84	95.63	85	82	Na	Na	120%	105%	100%	Na	Na
Persentase efektifitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota				%	90	90	91	93	94	100	100	91	Na	Na	111%	111%	100%	Na	Na
peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan				%	90	90	91	93	94	100	100	91	Na	Na	111%	111%	100%	Na	Na
Persentase efektifitas implementasi kebijakan bidang hukum				%	90	90	91	93	94	100	100	91	Na	Na	111%	111%	100%	Na	Na
Nilai Kematangan Organisasi Daerah				skor	19	29	22	28	31	24.78	31.84	22	Na	Na	130%	110%	100%	Na	Na
Presentase OPD dengan nilai Kematangan Organisasi dalam kategori minimal sedang				%	Na	Na	Na	75.61	85.37	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	132%	117%
presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik				%	52.10	70.00	64.32	89	100	92.63	93.22	64.32	Na	Na	178%	133%	100%	Na	Na
Persentase OPD yang predikat SAKIP nya A keatas				%	Na	Na	Na	60.98	85.37	Na	Na	Na	65.85	86.00	Na	Na	Na	108%	101%
Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B				%	73	78	78	87	92	75	83.67	78	Na	Na	103%	107%	100%	Na	Na

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya				%	25	50	40	70	85	40	68.57	40	Na	Na	160%	137%	100%	Na	Na
Persentase OPD dengan Nilai PMPRB nya B ke atas				%	Na	Na	Na	83.67	87.76	Na	Na	Na	91.83	93	Na	Na	Na	110%	106%
Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam				%	80	70	84	92	96	100	70	84	Na	Na	125%	100%	100%	Na	Na
Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang bidang SDA				%	Na	Na	Na	80	82	Na	Na	Na	82.61	82	Na	Na	Na	103%	100%
Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat				%	82	85	85	85	85	88.46	70	85	Na	Na	108%	82%	100%	Na	Na
Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian				%	85	70	89	93	95	87.50	70	89	Na	Na	103%	100%	100%	Na	Na
Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa				%	60	30	65	67	70	96.93	32	65	92.15	93	162%	107%	100%	138%	133%
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi				%	85	71	85	85	85	85.71	85.71	85	Na	Na	101%	121%	100%	Na	Na
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi				%	80	70	84	92	96	75	80	84	Na	Na	94%	114%	100%	Na	Na
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya				%	100	80	100	100	100	100	100	100	Na	Na	100%	125%	100%	Na	Na
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi				%	85	80	85	85	85	85.41	83.33	85	Na	Na	100%	104%	100%	Na	Na
Persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat				%	Na	Na	Na	85	90	Na	Na	Na	86.67	90	Na	Na	Na	102%	100%



Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi				%	100	80	100	100	100	90	40	100	Na	Na	90%	50%	100%	Na	Na
Efektifitas kebijakan perekonomian daerah				%	Na	Na	Na	76	78	Na	Na	Na	76.92	78	Na	Na	Na	101%	100%
Ketercapaian Laba BUMD				%	Na	Na	Na	70	75	Na	Na	Na	98.17	99	Na	Na	Na	140%	132%
<b>BIRO PEMOTDAKER</b>																			
Persentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD				%	100	100	100	100	100	100	100	100	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na
Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti				%	Na	Na	Na	90	90	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	111%	111%
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan				%	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na
Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti				%	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na
Efektivitas kerjasama daerah				%	Na	Na	Na	90	95	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	111%	105%
Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah				%	100	100	100	100	100	100	100	100	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na
Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah				%	100	100	100	100	100	100	100	100	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na
Persentase tertib administrasi pemerintahan				%	100	100	100	100	100	100	100	100	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na
Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah				%	Na	Na	Na	90	95	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	111%	105%

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker				%	100	100	100	100	100	100	100	100	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na
Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pemotdaker dan Asisten Pemerintahan				%	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	100%	100%
<b>BIRO ORGANISASI</b>																			
Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian (Biro Organisasi)				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan ( Biro Organisasi)				%	100	100	100	100	100	100	100	100	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na
Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi				%	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	100%	100%
Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat				%	78	85	87	92	97	78	85	82.50	Na	Na	100%	100%	95%	Na	Na
Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat				%	Na	Na	Na	85.71	91	Na	Na	Na	85.71	91	Na	Na	Na	100%	100%
Persentase Kabupaten/Kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat				%	28	45	57	71	85	40	45	88.57	Na	Na	143%	100%	155%	Na	Na
Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat				%	Na	Na	Na	91.84	95.92	Na	Na	Na	91.84	95.92	Na	Na	Na	100%	100%
Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15				%	14	51	31	40	48	37.14	51	52.78	Na	Na	265%	100%	170%	Na	Na

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya				%	Na	Na	Na	77.14	80	Na	Na	Na	77.14	80	Na	Na	Na	100%	100%
Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya				%	Na	Na	Na	29.27	34.15	Na	Na	Na	29.27	34.15	Na	Na	Na	100%	100%
Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB				%	83	84	85	85	86	83	84	89.5	Na	Na	100%	100%	105%	Na	Na
Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD				%	Na	Na	Na	85.36	87.8	Na	Na	Na	85.36	87.8	Na	Na	Na	100%	100%
Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan				%	52.29	67.99	79	89.19	100	66.67	67.99	79.44	85.88	89.47	128%	100%	101%	96%	89%
Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)				%	68	100	83	92	100	68	100	100	Na	Na	100%	100%	120%	Na	Na
Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat				%	Na	Na	Na	73.17	85.37	Na	Na	Na	87.8	85.37	Na	Na	Na	120%	100%
Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan				%	9.65	30.36	35	47.06	60	17.07	34.25	42.66	73.65	85.63	177%	113%	122%	157%	144%
presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15				%	39	100	51	57	63	95.83	100	100	Na	Na	246%	100%	196%	Na	Na
<b>BIRO KESRA</b>																			
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang keagamaan				%	100	100	100	100	100	100	100	100	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga				%	100	100	100	100	100	100	100	100	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				%	100	100	100	100	100	100	100	100	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na
Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya				%	85	85	90	95	100	85	85	90	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na
Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya				%	85	85	90	95	100	85	85	90	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na
Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya				%	85	85	90	95	100	85	85	90	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na
Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya				%	85	85	90	95	100	85	85	90	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na
Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya				%	85	85	85	95	100	85	85	85	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na
Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah				%	100	100	100	100	100	100	100	100	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar				%	Na	Na	Na	90	95	Na	Na	Na	91.64	95	Na	Na	Na	102%	100%
Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar				%	Na	Na	Na	90	95	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	111%	105%
Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik				%	Na	Na	Na	40	42	Na	Na	Na	40	42	Na	Na	Na	100%	100%
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat				%	100	100	100	100	100	100	100	100	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na
Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Kesra				%	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	100%	100%
<b>BIRO HUKUM</b>																			
Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum				%	90	91	92	93	94	107	100	92	Na	Na	119%	110%	100%	Na	Na
Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani				%	Na	Na	Na	95	96	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	105%	104%
Persentase efektifitas produk hukum daerah				%	93	93	93	93	93	100	100	100	Na	Na	108%	108%	108%	Na	Na
Persentase kabupaten/kota peduli HAM				%	90	91	92	93	94	97	100	92	Na	Na	108%	110%	100%	Na	Na
Persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun				%	90	91	92	93	94	100	100	92	Na	Na	111%	110%	100%	Na	Na
Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji				%	90	91	92	93	94	100	100	92	Na	Na	111%	110%	100%	Na	Na
Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan				%	Na	Na	Na	95	96	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	105%	104%
Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi				%	Na	Na	Na	95	95	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	105%	105%

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Hukum				%	100	100	100	100	100	100	100	100	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na
Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum				%	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	100%	100%
<b>BIRO ISDA</b>																			
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur				%	100	100	100	100	100	100	100	100	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian				%	100	100	100	100	100	100	100	100	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral				%	100	100	100	100	100	100	100	100	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na
Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya				%	80	85	90	95	100	100	85	90	Na	Na	125%	100%	100%	Na	Na
Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya				%	80	85	90	95	100	100	85	90	Na	Na	125%	100%	100%	Na	Na
Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya				%	80	85	90	95	100	100	85	90	Na	Na	125%	100%	100%	Na	Na

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya				%	80	100	90	95	100	100	100	90	Na	Na	125%	100%	100%	Na	Na
Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya				%	80	100	90	95	100	100	100	90	Na	Na	125%	100%	100%	Na	Na
Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya				%	80	100	90	95	100	100	100	90	Na	Na	125%	100%	100%	Na	Na
Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan				%	Na	Na	Na	90	95	Na	Na	Na	97.05	95	Na	Na	Na	108%	100%
Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur				%	Na	Na	Na	95	96	Na	Na	Na	98.99	96	Na	Na	Na	104%	100%
Presentase capaian kinerja program bidang pertanian				%	Na	Na	Na	87	90	Na	Na	Na	93.42	90	Na	Na	Na	107%	100%
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Isda				%	100	100	100	100	100	100	100	100	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na
Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang				%	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	100%	100%
<b>BIRO PEREKONOMIAN</b>																			
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata				%	80	80	80	80	80	81.25	80	80	Na	Na	102%	100%	100%	Na	Na

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM				%	80	85	90	93	96	81.48	85	90	Na	Na	102%	100%	100%	Na	Na
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD				%	83	85	88	90	93	84.85	85	88	Na	Na	102%	100%	100%	Na	Na
Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya				%	87	90	93	95	97	87	90	93	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na
Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya				%	85	89	90	93	95	85	89	90	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na
Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target				%	85	90	75	96	98	85	90	75	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na
Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya				%	82	85	87	90	92	100	85	87	Na	Na	122%	100%	100%	Na	Na
Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya				%	80	83	85	89	90	100	83	85	Na	Na	125%	100%	100%	Na	Na
Persentase tingkat kesehatan BUMD				%	80	82	70	88	90	93.33	82	70	Na	Na	117%	100%	100%	Na	Na
Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan				%	Na	Na	Na	80	82	Na	Na	Na	87.5	82	Na	Na	Na	109%	100%



Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan				%	Na	Na	Na	75	77	Na	Na	Na	75	77	Na	Na	Na	100%	100%
Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha				%	Na	Na	Na	75	80	Na	Na	Na	85.71	80	Na	Na	Na	114%	100%
Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan				%	Na	Na	Na	80	85	Na	Na	Na	94.59	85	Na	Na	Na	118%	100%
Nilai kemandirian BLUD				%	Na	Na	Na	50	55	Na	Na	Na	69.34	55	Na	Na	Na	139%	100%
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Perekonomian				%	100	100	100	100	100	100	100	100	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na
Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian				%	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	100%	100%
<b>BIRO APBJ</b>																			
Persentase Aduan dan Sengketa yang tertangani				%	-	73	76	79	80	0	73	76	Na	Na	Na	100%	100%	Na	Na
Persentase Efektivitas Sistem Informasi pengadaan barang/jasa				%	-	73	76	79	80	0	73	76	Na	Na	Na	100%	100%	Na	Na
Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa				%	-	91	92	93	95	0	91	92	Na	Na	Na	100%	100%	Na	Na
Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan				%	Na	Na	Na	90	92	Na	Na	Na	90	92	Na	Na	Na	100%	100%
Efektivitas Pengadaan secara Elektronik				%	Na	Na	Na	85	90	Na	Na	Na	95.27	90	Na	Na	Na	112%	100%
Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa				%	Na	Na	Na	93	95	Na	Na	Na	94.80	95	Na	Na	Na	102%	100%
Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro APBJ				%	100	100	100	100	100	100	100	100	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah				%	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	100%	100%
<b>BIRO ADM. BANGDA</b>																			

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan AsetPerencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset				%	85	85	85	85	85	100	100	85	Na	Na	118%	118%	100%	Na	Na
Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target				%	80	80	81	84	85	96.06	80.68	81	Na	Na	120%	101%	100%	Na	Na
Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD				%	100	100	100	100	100	100	100	100	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na
Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu				%	87	87	88	88	88	95.63	95.24	88	Na	Na	110%	109%	100%	Na	Na
Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target				%	85	84	84	89	90	85.05	84.35	84	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na
Persentase Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya				%	100	100	100	100	100	100	100	100	Na	Na	100%	100%	100%	Na	Na
Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi				%	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	100%	100%
Persentase realisasi bantuan keuangan				%	Na	Na	Na	83	85	Na	Na	Na	99.57	85	Na	Na	Na	120%	100%
Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah				%	Na	Na	Na	80	85	Na	Na	Na	92	85	Na	Na	Na	115%	100%
Capaian Pelaksanaan APBD				%	Na	Na	Na	98	98.5	Na	Na	Na	99.09	98.5	Na	Na	Na	101%	100%
Capaian Pelaksanaan APBN				%	Na	Na	Na	95	95.50	Na	Na	Na	98.99	95.50	Na	Na	Na	104%	100%
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. banda				%	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	100%	100%

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun 2018-2023					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Adpem				%	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	100%	100%
Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah				%	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	100	100	Na	Na	Na	100%	100%

Tabel 2.3  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Peayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah  
 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Uraian	Pagi Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai dengan Tahun (Rp.000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp.000)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	-	-	-	-	-	<b>1,906,250,000</b>	<b>326,000,000</b>	<b>812,600,000</b>	<b>832,000,000</b>	<b>950,000,000</b>	<b>1,891,774,800</b>	<b>440,106,000</b>	<b>485,600,000</b>	<b>616,000,000</b>	-	99%	135%	60%	74%	Na	20,73	(13,18)
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	-	-	-	-	-	<b>1,906,250,000</b>	<b>326,000,000</b>	<b>812,600,000</b>	<b>832,000,000</b>	<b>950,000,000</b>	<b>1,891,774,800</b>	<b>440,106,000</b>	<b>485,600,000</b>	<b>616,000,000</b>	-	99%	135%	60%	74%	Na	20,73	(13,18)
	Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	1,906,250,000	326,000,000	812,600,000	832,000,000	950,000,000	1,891,774,800	440,106,000	485,600,000	616,000,000	-	99%	135%	60%	74%	Na	20,73	(13,18)
II	<b>BELANJA DAERAH</b>	-	-	-	-	-	<b>278,785,401,000</b>	<b>188,186,292,000</b>	<b>644,715,876,000</b>	<b>628,782,550,000</b>	<b>665,672,541,000</b>	<b>260,002,192,803</b>	<b>181,106,590,847</b>	<b>588,580,305,652</b>	<b>614,386,948,554</b>	-	93%	96%	91%	98%	Na	53,37	66,34
	<b>BELANJA OPERASI</b>	-	-	-	-	-	<b>264,074,811,000</b>	<b>182,902,619,000</b>	<b>640,691,373,000</b>	<b>624,032,738,000</b>	<b>659,812,541,000</b>	<b>245,504,956,278</b>	<b>175,833,068,227</b>	<b>584,603,803,452</b>	<b>609,709,620,380</b>	-	93%	96%	91%	98%	Na	55,67	69,46
	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	129,924,889,000	116,460,830,000	103,630,731,000	107,526,291,000	126,268,980,000	120,886,938,992	111,264,042,729	102,464,923,893	104,585,679,751	-	93%	96%	99%	97%	Na	(0,05)	(4,60)
	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	134,149,922,000	66,441,789,000	152,406,532,000	89,888,837,000	99,540,711,000	124,618,017,286	64,569,025,498	108,946,745,559	87,164,830,629	-	93%	97%	71%	97%	Na	12,16	0,18
	Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-	384,654,110,000	426,617,610,000	434,002,850,000	-	-	373,192,134,000	417,959,110,000	-	Na	Na	97%	98%	Na	3,16	12,00
	<b>BELANJA MODAL</b>	-	-	-	-	-	<b>14,710,590,000</b>	<b>5,283,673,000</b>	<b>4,024,503,000</b>	<b>4,749,812,000</b>	<b>5,860,000,000</b>	<b>14,497,236,525</b>	<b>5,273,522,620</b>	<b>3,976,502,200</b>	<b>4,677,328,174</b>	-	99%	100%	99%	98%	Na	(11,63)	(23,53)
	Belanja Modal Pealatan dan Mesin	-	-	-	-	-	14,665,590,000	5,273,770,000	3,377,167,000	4,749,812,000	5,860,000,000	14,452,361,525	5,263,619,620	3,340,114,200	4,677,328,174	-	99%	100%	99%	98%	Na	(8,99)	(20,03)
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-	-	-	-	193,350,000	-	-	-	-	191,053,000	-	-	Na	Na	99%	Na	Na	Na	Na
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	45,000,000	9,903,000	453,986,000	-	-	44,875,000	9,903,000	445,335,000	-	-	100%	100%	98%	Na	Na	Na	Na
III	<b>PEMBIAYAAN</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh beberapa perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal dalam skala regional, nasional dan internasional. Perubahan-perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal dalam skala regional, nasional dan internasional tersebut saling terkait memberikan pengaruh terhadap rencana strategis dan orientasi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

##### a. Tantangan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

- 1) Perlunya persiapan Pilkada Serentak tahun 2024 beserta Pelantikan Bupati/Walikota yang AMJ habis di TH 2023 serta Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD;
- 2) Harmonisasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan produk hukum provinsi Jawa Tengah serta fasilitasi dan evaluasi rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;
- 3) Masih terdapat disparitas kualitas sarana prasarana keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan;
- 4) Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BUMD;
- 5) Sektor pertanian yang masih sering terganggu cuaca ekstrim, hama tikus serta OPT lainnya yang sangat masif dan lain-lain berpotensi menghambat produksi pada komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
- 6) Pengembangan e-purchasing dengan penambahan etalase produk pada e-katalog lokal dan peningkatan kerjasama Usaha Menengah Kecil dan Koperasi (UMKK) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam toko daring (Blangkon Jateng);
- 7) Manajemen pengelolaan kinerja organisasi dan kinerja individu ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 8) Pengendalian agenda-agenda pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
- 9) Peningkatan sarana prasarana dan pelayanan umum Sekretariat Daerah Jawa Tengah.

##### b. Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

- 1) Adanya komitmen pemerintah untuk melaksanakan peningkatan koordinasi dan fasilitasi kerjasama daerah guna mensinergikan semua stakeholder pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memiliki produk hukum daerah Provinsi Jawa Tengah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan lainnya, kepentingan umum, efektif dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan harapan masyarakat;
- 3) Tertib administrasi dalam penyusunan dan pembentukan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara serta dalam perlindungan hukum atas pengamanan barang milik daerah/asset;

- 4) Adanya hibah insentif pendidik keagamaan, hibah Bosda MA Negeri dan swasta, pendidikan keagamaan (sarpras), dan keagamaan (sarana peribadatan);
- 5) Komitmen pemerintah dalam meningkatkan peran UMKM agar mampu menyerap tenaga kerja yang banyak karena memiliki fleksibilitas dalam menjalankan usahanya;
- 6) Koordinasi dengan perangkat daerah terkait pencapaian kinerja dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur dan SDA;
- 7) Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan fasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota guna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;
- 8) Pengembangan dan pendayagunaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
- 9) Adanya penyederhanaan Birokrasi sebagai amanat dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi guna Birokrasi yang lebih dinamis dan berkinerja optimal;
- 10) Adanya sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pengendalian APBD dan pencapaian target-target kinerja pembangunan daerah;
- 11) Tercapainya pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang cepat, lancar dan bertanggungjawab.

BAB III  
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Perwujudan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang optimal, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya terdapat berbagai permasalahan yang menjadi hambatan pelayanan dimaksud. Pelayanan Sekretariat Daerah berada pada lingkup tugas pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. Lingkup tugas pelayanan Sekretariat Daerah dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa permasalahan, seperti:

- a. Adanya dinamika beberapa kebijakan antara lain UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang menuntut adanya pengelolaan BUMD agar mampu memberikan kontribusi PAD yang lebih besar dan adanya peraturan Menpan RB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang menuntut adanya kebijakan terkait pembinaan jabatan fungsional analisis kebijakan di tingkat Provinsi Jawa Tengah.
- b. Belum optimalnya perumusan rekomendasi dalam rangka penyusunan kebijakan daerah oleh Biro-biro di lingkup Sekretariat Daerah kepada pimpinan;
- c. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah secara komprehensif dan integratif oleh Biro Lingkup Sekretariat Daerah kepada Perangkat Daerah;
- d. Belum optimalnya pengoordinasian upaya pencapaian target pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- e. Kapasitas SDM belum cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah secara optimal;
- f. Belum optimalnya pemenuhan sarana-prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Berangkat dari berbagai permasalahan umum pelayanan Sekretariat Daerah di atas selanjutnya diperumuskan lingkup masalah pokok, masalah isu kebijakan, dan akar masalah yang selanjutnya disajikan dalam tabel 3.1. sebagai berikut:

Tabel 3.1.  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

<b>NO.</b>	<b>URUSAN/MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
1	<b>Fungsi Lainnya (Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama)</b>		
	Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah, dan kerjasama.	Belum Optimalnya kerjasama antar pemerintah, Lembaga, Badan Usaha dan Swasta.	Belum efektifnya pelaksanaan kerjasama antar pemerintah.
			Belum efektifnya pelaksanaan Kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta.
			Belum optimalnya pemetaan potensi kerjasama dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.
		Kurang optimalnya administrasi dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.	Belum optimalnya Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan.
			Masih adanya kesenjangan pada wilayah perbatasan.
			Masih tingginya kasus sengketa tanah pemerintah.
		Kurang maksimalnya pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.	Tingginya frekuensi permohonan layanan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD.
			Belum optimalnya pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan sesuai kewenangan
			Belum efektifnya evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan



2	<b>Fungsi Lainnya (Biro Hukum)</b>		
	Belum efektif dan sinkronnya pelaksanaan kebijakan bidang hukum di Jawa Tengah	Belum sinerginya produk hukum daerah di Jawa Tengah.	Masih terdapat produk hukum daerah bersifat pengaturan yang belum sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
			Masih terdapat produk hukum daerah bersifat penetapan yang belum sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
			Belum optimalnya hasil dokumentasi produk hukum dan naskah hukum lainnya di Jawa Tengah.
			Masih terdapat produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang belum sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pusat dan Provinsi)
		Belum dipahaminya kebijakan – kebijakan daerah yang nantinya dapat menimbulkan permasalahan hukum	Belum optimalnya penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
			Belum optimalnya penanganan permasalahan hukum non litigasi dan HAM di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
3	<b>Fungsi Lainnya (Biro Kesejahteraan Rakyat)</b>		
	Belum Optimalnya pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja bidang Kesejahteraan Rakyat	Belum optimalnya pembinaan mental spiritual.	Belum terpenuhinya sarana prasarana keagamaan yang berkuantitas dan kualitas di Jawa Tengah

			Belum terpenuhinya pelayanan kelembagaan keagamaan yang berkuantitas dan kualitas di Jawa Tengah
		Belum Efektifnya pencapaian urusan bidang Pelayanan Dasar.	Pelaksanaan urusan Pendidikan belum sinergi dengan OPD Pengampu serta Kab/Kota
			Pelaksanaan urusan Kesehatan belum sinergi dengan OPD Pengampu serta Kab/Kota
			Pelaksanaan urusan Sosial belum sinergi dengan OPD Pengampu serta Kab/Kota
		Belum Efektifnya pencapaian urusan bidang Pelayanan Non Dasar.	Pelaksanaan urusan Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan belum sinergi dengan OPD Pengampu serta Kab/Kota
			Pelaksanaan urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana belum sinergi dengan OPD Pengampu serta Kab/Kota
			Pelaksanaan urusan Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan belum sinergi dengan OPD Pengampu serta Kab/Kota

4.	<b>Fungsi Lainnya (Biro Perekonomian)</b>		
	Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan perekonomian dalam merespon dinamika lingkungan strategis perekonomian global/nasional/regional/lokal yang sangat VUCA ( <i>Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity</i> ).	Belum optimalnya pengelolaan kebijakan perekonomian daerah yang sinergi antara hulu dan hilir	Belum optimalnya penyediaan perumusan kebijakan ekonomi makro (Pertumbuhan ekonomi, Inflasi, PDRB Perkapita, Investasi, Kemiskinan dan Pengangguran).
			Belum optimalnya penyediaan perumusan kebijakan perekonomian yang mendasarkan sinergi data empiris yang handal (Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Pariwisata, Penanaman Modal dan Perhubungan).
		Kurang efektifnya BUMD dan BLUD dalam implementasi kebijakan daerah yang mendukung pengembangan ekonomi daerah.	Belum terdapat roadmap yang secara konsisten terkait penambahan penyertaan modal disetor kepada BUMD tiap tahunnya supaya tidak terjadi dilusi dan untuk pengembangan usaha.
			Sumber utama operasional BLUD masih tergantung dari APBD
			BUMD dan BLUD dalam mengelola operasionalnya belum sepenuhnya menerapkan GCG

5	<b>Fungsi Lainnya (Biro ISDA)</b>		
	Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan infrastruktur dan sumber daya alam dalam mendukung pembangunan perekonomian daerah	Belum optimalnya sinergi dan efektifitas pencapaian kinerja kebijakan pertanian dalam arti luas.	Belum optimalnya penyediaan perumusan kebijakan pembangunan bidang Pertanian
			Belum optimalnya penyediaan perumusan kebijakan pembangunan bidang Ketahanan pangan.
			Belum optimalnya penyediaan perumusan kebijakan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan.
		Belum optimalnya sinergi dan efektifitas pencapaian kinerja kebijakan ESDM, lingkungan hidup dan kehutanan	Belum optimalnya penyediaan perumusan kebijakan pembangunan bidang Energi dan sumber daya mineral
			Belum optimalnya penyediaan perumusan kebijakan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan
		Belum optimalnya sinergi dan efektifitas pencapaian kinerja kebijakan infrastruktur	Belum optimalnya penyediaan perumusan kebijakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Belum optimalnya penyediaan perumusan kebijakan pembangunan bidang Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman

6	<b>Fungsi Lainnya (Biro Adm. Barang/Jasa)</b>		
	PA/KPA/PPK sumber DAK tidak mengajukan tender mendahului pengesahan dokumen anggaran, tender tahun anggaran berjalan berpotensi kontrak terlambat atau melampaui tenggat waktu input aplikasi OM-SPAN sehingga DAK menjadi tidak terserap	Penganggaran dan pemilihan penyedia jasa konsultasi konstruksi tidak dilakukan pada tahun anggaran (n-1) dengan menggunakan dana pendamping dari APBD	Ketidaksiapan PA/KPA/PPK dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan yang dibiayai DAK
	Untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran, belum semua mengajukan tender sesuai alokasi waktu ideal yang ditetapkan	Kontrak terlambat ditandatangani awal tahun / setelah dokumen anggaran disahkan, PA/KPA/PPK melakukan dua metode pemilihan dalam satu paket pekerjaan	Ketidaksiapan PA/KPA/PPK dalam perencanaan dan penganggaran tahun jamak/atau kontrak payung
	Pemenang tender cepat bukan peserta yang menyampaikan harga terendah, hal ini tidak sesuai Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang menyatakan bahwa pengumuman pemenang dengan harga penawaran terendah	Pemenang dengan harga terendah tidak hadir memenuhi undangan Pokja Pemilihan untuk dilakukan verifikasi	Peserta yang tidak hadir untuk dilakukan verifikasi tidak menyampaikan alasan, berpotensi melanggar etika pengadaan dan dianggap mengundur diri serta tidak dikenakan sanksi sesuai Perka LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

	Penetapan Metode Pemilihan dalam perencanaan PBJ sebagian belum sesuai dengan Peraturan yang berlaku	Tingkat pemahaman dari sebagian pelaku perencana pengadaan barang/jasa belum sesuai ketentuan	Kurangnya pemahaman dan koordinasi dari PPK beserta pelaku perencana pengadaan barang/jasa
	Metode Tender Cepat dilaksanakan karena waktunya mendesak	Tender Cepat dipahami sebagai metode pemilihan penyedia agar cepat selesai	Kurangnya pemahaman dari PPK terhadap penetapan metode pemilihan Tender Cepat
	Belum optimalnya pelaksanaan Konsolidasi paket pengadaan barang/jasa di sebagian SKPD	Kurangnya pemahaman metode konsolidasi dalam proses PBJ	Belum dipahaminya manfaat dari paket pengadaan barang/jasa dengan metode konsolidasi
	Rata-rata pengadaan barang/jasa melalui sistem pengadaan secara elektronik masih kecil	Tingkat input pengadaan barang/jasa melalui sistem pengadaan secara elektronik masih kecil	Belum terintegrasinya sistem pengadaan secara elektronik dengan sistem pembayaran keuangan (e-delivery) sehingga data pengadaan pada sistem pengadaan secara elektronik tidak terbaca
	Pengadaan barang/jasa melalui bela pengadaan belum dapat di implementasikan	Alur pengadaan barang/jasa serta proses pembayaran belum sepenuhnya sesuai aturan yang berlaku	Proses pengadaan barang/jasa belum sepenuhnya mengacu ketentuan Perpres No.16 Tahun 2016 dan belum dapat menggunakan KKP (Kartu Kredit Pemerintah)
	Terbatasnya SDM Pengadaan Barang/Jasa	Kurang Berminatnya ASN untuk masuk dalam bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa	Tingginya Resiko SDM pengadaan barang/jasa yang langsung bersentuhan dengan pihak lain
	Masih munculnya permasalahan hukum di pengadaan barang/jasa	Masih kurangnya pemahaman dari para pelaku pengadaan barang/jasa dan pihak lain	Masih perlunya peningkatan pemahaman, profesionalisme dan integritas dari para pelaku pengadaan barang/jasa
7	<b>Fungsi Lainnya (Biro Bangda)</b>		
	Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.	Belum optimalnya pencapaian hasil pembangunan daerah.	Belum efektifnya pelaksanaan pembangunan yang dibiayai melalui APBD.

			Belum efektifnya pelaksanaan pembangunan yang dibiayai melalui APBN.
			Belum efektifnya pelaksanaan pembangunan kewilayahan.
		Belum optimalnya manajemen data dan informasi pembangunan daerah bagi penyusunan kebijakan teknis.	Belum optimalnya pengelolaan data/informasi pelaksanaan pembangunan APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kab/Kota.
			Belum optimalnya analisis kinerja pembangunan daerah.
			Belum Optimalnya hasil analisis pembangunan daerah sebagai perumusan kebijakan teknis.
8	<b>Fungsi Lainnya (Biro Organisasi)</b>		
	Kinerja dan tata kelola Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah belum optimal.	Capaian Indeks RB Kab/Kota dan Nilai PMPRB Perangkat belum optimal.	Kurangnya Komitmen Kepala Daerah dan Kepala Perangkat dalam Implementasi Reformasi Birokrasi.
		Capaian Nilai SAKIP Kab/Kota dan Perangkat belum optimal.	Sinergitas dan koordinasi terkait implementasi SAKIP antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota belum optimal.
		Unit Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Tengah belum seluruhnya melaksanakan SKM.	Pelaksanaan SKM di UPP sebagian besar masih belum optimal.
		Capaian Nilai Kematangan Organisasi di Perangkat Daerah Belum Optimal.dan Kab/Kota di Jateng belum seluruhnya melakukan evaluasi kematangan organisasi.	Sebagian besar Perangkat dan Kabupaten/Kota belum sepenuhnya memahami pentingnya evaluasi kematangan organisasi.

9	<b>Fungsi Lainnya (Biro Umum)</b>		
	Belum Optimalnya Pelayanan Rumah Tangga, Pengelolaan Aset dan Administrasi Umum Setda	Belum Optimalnya Pelayanan Rumah Tangga Setda	Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Yang Dinamis
			Kebutuhan Rumah Tangga Urusan Dalam Yang Dinamis
			Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Asisten Administrasi
		Belum Optimalnya Pengelolaan Dan Pengamanan Aset Setda	Belum Optimalnya Pengelolaan Dan Pemenuhan Aset Setda
			Belum Optimalnya Pengamanan Aset Setda
		Belum Optimalnya Pengelolaan Administrasi TU Dan Keuangann Setda	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan
			Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan TU Biro dan Staf Ahli
	Peran Humas dan Keprotokolan Semakin Strategis dalam Mendukung Kegiatan Pimpinan	Kebutuhan Publikasi dan Humas yang Dinamis	Tuntuan Peningkatan Kualitas Penyajian Naskah Pimpinan yang Dinamis
			Tuntuan Peningkatan Kualitas Materi Publikasi yang Dinamis
			Tuntuan Peningkatan Kualitas Dokumentasi yang Dinamis
		Kebutuhan Peningkatan Layanan Keprotokolan dan Administrasi	Perlunya Peningkatan Kualitas Layanan Acara Pimpinan
			Perlunya Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Pimpinan



			Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan TU Biro
		Belum Optimalnya kualitas layanan Administrasi Pimpinan	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan TU Gubernur
			Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan TU Wakil Gubernur
			Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan TU Sekda

### 3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

#### a. Telaahan Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yaitu: (1). Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah; (2). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; (3). Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; dan (4). Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur. Terhadap tugas dan fungsi tersebut dapat ditelaah faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah sebagai bahan salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah.

Tabel 3.2.

Telaah Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

<b>Tupoksi PD</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Faktor Penghambat dan Pendorong</b>
1) Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah; 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;	Belum optimalnya pelaksanaan tugas mengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah oleh biro lingkup Setda, utamanya dalam melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.	<b>Faktor Penghambat</b> Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi SDM dalam melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah <b>Faktor Pendorong</b> Tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembangunan daerah melalui Sistem informasi yang terintegrasi berbasis agenda pembangunan daerah.
3) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;	Manajemen secara integratif pelaksanaan tugas perangkat daerah belum optimal sehingga pelaksanaan tugas perangkat daerah belum efektif dan akuntabel.	<b>Faktor Penghambat</b> Belum optimalnya tata hubungan kerja Biro lingkup Setda dengan SKPD teknis pelaksana urusan daerah dalam koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah. <b>Faktor Pendorong</b> Tersedianya data dan informasi kinerja perangkat daerah

Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
		melalui Sistem informasi yang terintegrasi.
4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur;	Administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal mendorong efektifitas koordinasi berbagai lingkup pemerintahan daerah.	<b>Faktor Penghambat</b> Belum optimalnya fungsi pembinaan pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten/kota dan belum optimalnya koordinasi yang efektif dengan instansi pemerintah pusat di daerah <b>Faktor Pendorong</b> Adanya sinergi pelaksanaan tugas dengan berbagai stakeholders (instansi pusat di daerah, Kabupaten/Kota dan masyarakat).

b. Telaahan Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Berikut gambaran hubungan relasional pelaksanaan tugas dan fungsi Sekda dengan K/L dan Kabupaten/Kota serta permasalahan, faktor penghambat, dan faktor pendorong.

Tabel 3.3.

Telaah Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

No	Renstra PD Provinsi	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur.	Koordinasi dengan instansi pemerintah pusat di daerah belum optimal	<b>Faktor Penghambat:</b> Belum optimalnya sinergi pelaksanaan pembangunan oleh instansi pusat di daerah dan Kab/Kota dengan perangkat daerah di Jawa Tengah <b>Faktor Pendorong</b> Adanya potensi kolaborasi sumber daya dalam rangka

No	Renstra PD Provinsi	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				pelaksanaan pembangunan.

c. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak terkait secara langsung dengan RTRW dan KLHS pada RPJMD.

Tabel 3.4

Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
I	<b>RTRW</b>			
	Pola ruang dan struktur ruang RTRW			
	Program Indikatif			
II	<b>KLHS</b>			
	Permasalahan dan Isu Strategis			
	Skenario dan Rekomendasi			

Berdasarkan pada telaahan diatas, maka didapatkan isu- isu strategis pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kebijakan daerah,
2. Penataan Birokrasi Biro Lingkup Sekretariat Daerah,
3. Penguatan Kapasitas ASN Biro Lingkup Sekretariat Daerah,
4. Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah,
5. Pengembangan Jejaring Manajemen dan SDM yang Profesional, dan
6. Sinkronisasi Agenda Pembangunan.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Provinsi Jawa Tengah

Reformasi Birokrasi di Jawa Tengah telah dilaksanakan dengan memperhatikan 8 (delapan) area perubahan meliputi: (1). Manajemen Perubahan; (2). Deregulasi Kebijakan; (3). Penataan dan Penguatan Organisasi; (4). Penataan Tatalaksana; (5). Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; (6). Penguatan Akuntabilitas; (7). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan (8). Penguatan Pengawasan. Sekretariat Daerah Jawa Tengah memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Tengah terutama dalam perumusan kebijakan daerah, selain itu sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan di Jawa Tengah. Rumusan Kebijakan kemudian dituangkan kedalam regulasi yang diharapkan menjadi sarana mencapai target-target pembangunan dan mampu menjawab kebutuhan perubahan lingkungan strategis yang cepat, dinamis, kompleks, tidak terduga, dan tidak pasti di era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*) saat ini.

Dalam rangka memperkuat Tusi Sekretariat Daerah dan melaksanakan amanah kebijakan Pusat telah dilaksanakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tersebut meliputi: penyederhanaan struktur organisasi; penyetaraan jabatan; dan penyesuaian sistem kerja. Pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Daerah mengalami perampingan. Pejabat eselon III dan eselon IV disetarakan menjadi pejabat fungsional, umumnya menjadi analis kebijakan sesuai dengan Tusi Sekretariat Daerah terkait perumusan kebijakan. Pejabat eselon III disetarakan jabatannya menjadi Analis Kebijakan Ahli Madya, sedangkan eselon IV disetarakan menjadi Analis Kebijakan Ahli Muda untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat secara efektif mengungkit hasil-hasil kinerja pembangunan daerah. Selain itu, kebijakan yang dihasilkan dapat menyesuaikan terhadap kebutuhan penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat.

#### a. Tujuan Sekretariat Provinsi Jawa Tengah

Guna memecahkan permasalahan serta menangani isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka ditetapkan rumusan tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2024-2026 ditetapkan dua tujuan Setda, yaitu: 1. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah dan 2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah.

#### b. Sasaran Sekretariat Provinsi Jawa Tengah

Guna mencapai hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud, maka rumusan Sasaran yang akan di capai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah:

Tujuan pertama, Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah memiliki satu sasaran, yaitu: Meningkatnya Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan

Berorientasi Hasil. Sedangkan Tujuan kedua, Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Setda memiliki dua sasaran, yaitu:

- 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 2) Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah.

Guna mewujudkan sasaran tersebut, Sekretariat Daerah dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 merumuskan sejumlah program, yaitu Sasaran “Meningkatnya Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan Berorientasi Hasil” akan diwujudkan melalui tujuh program, yaitu: (1).Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah; (2).Program Kesejahteraan Rakyat; (3).Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum; (4).Program Perekonomian dan Pembangunan; (5).Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa; (6).Program Kebijakan Administrasi Pembangunan; (7).Program Penataan Organisasi.

Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah” dan “Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah” keduanya diwujudkan melalui Program Administrasi Umum.

Adapun Tujuan dan Sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan dalam tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		TARGET CAPAIAN			Kondisi Akhir
				2021	2022	2024	2025	2026	
Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah		Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	Na	Na	36.1	37.1	38.1	38.1
	Meningkatnya Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan Berorientasi Hasil	Persentase capaian kinerja program OPD lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%	Na	Na	80	80	80	80
		Persentase capaian kinerja program OPD lingkup Perekonomian dan Pelayanan PBJ	%	Na	Na	90	90	90	90
		Persentase capaian kinerja program OPD lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	Na	Na	90	90	90	90

Untuk tujuan dan sasaran, serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan, ditetapkan sebagai berikut:

Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	Na	Na	76	76.5	77	77
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	Na	Na	82	82.5	83	83
	Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah	Nilai MRI Perangkat Daerah	Angka	Na	Na	2.83	2.85	2.87	2.87

Keterangan:

- Na = merupakan indikator baru dan belum memiliki baseline

#### 4.2. Manajemen Resiko Sekretariat Daerah

Manajemen resiko merupakan proses pengelolaan terhadap resiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi resiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Sekretaris Daerah tidak menyusun proses manajemen risiko pada jenis konteks strategis (tabel 4.2). Manajemen risiko Sekretaris Daerah dirumuskan pada jenis konteks operasional.



**Tabel 4.2**  
**Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Resiko Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Daerah**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026**

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Resiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**NIHIL**

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Rumusan strategi yang disusun bersifat operasional, yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan Sekretariat Daerah yang menjadi tugas dan fungsinya. Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah pada konteks peningkatan kualitas kebijakan, memiliki kekuatan berupa dokumen rencana jangka menengah dan jangka pendek (tahunan) yang selalu dievaluasi dan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan dinamika pembangunan namun memiliki kelemahan produk-produk kebijakan pembangunan yang belum senantiasa adaptif dan berorientasi hasil. Sedangkan peluang yang ada yaitu adanya berbagai kebijakan Pemerintah Pusat yang berorientasi pada peningkatan kebijakan yang cepat, *agile* dan berorientasi hasil. Tantangan yang dihadapi berupa belum optimalnya sinergi sektor-sektor pembangunan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan kebijakan pembangunan yang berkualitas. Oleh karena itu, Rentras Sekretariat Daerah tahun 2024-2026 merumuskan arah kebijakan berupa peningkatan kualitas kebijakan daerah yang berorientasi hasil dan adaptif; penguatan kapasitas ASN biro lingkup Sekretariat Daerah; peningkatan efektivitas pembangunan daerah melalui pengembangan jejaring manajemen dan SDM yang profesional; dan penataan kelembagaan dan peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Sekretariat Daerah pada konteks pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Daerah, memiliki kekuatan berupa agenda untuk meningkatkan kualitas layanan melalui survei IKM secara periodik, dokumen manajemen risiko dan dokumen rencana kinerja tahunan namun memiliki kelemahan hasil survei IKM, dokumen manajemen risiko dan rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan kualitas pelayanan. Sedangkan peluang yang ada yaitu adanya arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait reformasi pelayanan publik. Tantangan yang dihadapi berupa belum optimalnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan layanan yang semakin berkualitas. Oleh karena itu, Rentras Sekretariat Daerah merumuskan arah kebijakan berupa peningkatan indeks kepuasan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat Daerah dan peningkatan efektivitas manajemen risiko melalui sinkronisasi agenda biro-biro lingkup Sekretariat Daerah. Perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1  
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan  
 Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah	Meningkatnya Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan Berorientasi Hasil	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas kebijakan daerah yang berorientasi hasil dan adaptif
		Meningkatkan koordinasi, sinergi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	Penguatan Kapasitas ASN Biro Lingkup Sekretariat Daerah
			Peningkatan Efektivitas Pembangunan Daerah melalui Pengembangan Jejaring Manajemen dan SDM yang Profesional
			Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah
Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian, dan keuangan	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat Daerah
	Meningkatnya manajemen risiko Sekretariat Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Peningkatan efektifitas manajemen resiko melalui Sinkronisasi Agenda Biro-Biro Lingkup Sekretariat Daerah

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Renstra Tahun 2024-2026 sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab V, maka diperlukan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja serta pendanaan indikatif tahun 2024-2026.

Adapun rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pembangunan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 secara rinci tertuang dalam tabel 6.1 sebagai berikut.

Tabel 6.3.  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
						2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah							200,459,146,000		189,437,850,000		234,616,436,000		624,513,432,000	Sekretariat Daerah			
				Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Angka	76		76.5		77		77		Sekretariat Daerah			
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah *						200,184,146,000		189,187,850,000		234,321,436,000		623,693,432,000	Sekretariat Daerah			
				Indeks Kepuasan Masyarakat *	Angka	82	200,184,146,000	82.5	189,187,850,000	83	234,321,436,000	83	623,693,432,000	Sekretariat Daerah			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI **				200,184,146,000		189,187,850,000		234,321,436,000		623,693,432,000				
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan **	%	100	6,671,500,000	100	6,065,000,000	100	7,811,000,000	100	20,547,500,000				
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***				27,500,000		25,000,000		35,000,000		87,500,000				
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan ***	%	100	27,500,000	100	25,000,000	100	35,000,000	100	87,500,000				
		X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ****				27,500,000		25,000,000		35,000,000		87,500,000				
				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah ****	Laporan	12	27,500,000	12	25,000,000	12	35,000,000	36	87,500,000		Biro Umum, JAWA TENGAH; OPD Provinsi		
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				33,000,000		30,000,000		40,000,000		103,000,000				
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan ***	Laporan	12	33,000,000	12	30,000,000	12	40,000,000	36	103,000,000				
		X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****				33,000,000		30,000,000		40,000,000		103,000,000				
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	12	33,000,000	12	30,000,000	12	40,000,000	36	103,000,000		Biro Umum, JAWA TENGAH; OPD Provinsi		
		X.XX.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ***				231,000,000		210,000,000		236,000,000		677,000,000				
				Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan ***	%	100	231,000,000	100	210,000,000	100	236,000,000	100	677,000,000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ****				176,000,000		160,000,000		176,000,000		512,000,000		
				Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah yang disediakan ****	Paket	4	100,000,000	4	80,000,000	4	100,000,000	12	280,000,000		OPD Provinsi; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan wakil kepala daerah yang disediakan ****	Paket	4	76,000,000	4	80,000,000	4	76,000,000	12	232,000,000		OPD Provinsi; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ****				55,000,000		50,000,000		60,000,000		165,000,000		
				Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah ****	Orang	4	27,500,000	4	25,000,000	4	30,000,000	4	82,500,000		OPD Provinsi; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Wakil Kepala Daerah ****	Orang	4	27,500,000	4	25,000,000	4	30,000,000	4	82,500,000		OPD Provinsi; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah ***				6,380,000,000		5,800,000,000		7,500,000,000		19,680,000,000		
				Persentase layanan fasilitas kerumahtanggaan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan ***	%	100	6,380,000,000	100	5,800,000,000	100	7,500,000,000	100	19,680,000,000		
		X.XX.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah ****				3,245,000,000		2,950,000,000		3,500,000,000		9,695,000,000		
				Mengukur jumlah orang Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan medical check up dalam satu tahun ****	Paket	12	3,245,000,000	12	2,950,000,000	12	3,500,000,000	36	9,695,000,000		OPD Provinsi; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah ****				1,925,000,000		1,750,000,000		2,500,000,000		6,175,000,000		
				Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan ****	Paket	12	1,925,000,000	12	1,750,000,000	12	2,500,000,000	36	6,175,000,000		OPD Provinsi; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah ****				1,210,000,000		1,100,000,000		1,500,000,000		3,810,000,000		
				Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan ****	Paket	12	1,210,000,000	12	1,100,000,000	12	1,500,000,000	36	3,810,000,000		OPD Provinsi; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah **	%	100	406,000,000	100	396,500,000	100	452,050,000	100	1,254,550,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***				406,000,000		396,500,000		452,050,000		1,254,550,000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah ***	%	100	406,000,000	100	396,500,000	100	452,050,000	100	1,254,550,000		
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				350,000,000		360,000,000		400,000,000		1,110,000,000		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan ****	Laporan	24	350,000,000	24	360,000,000	24	400,000,000	72	1,110,000,000		Biro Administrasi Pembangunan, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ****				56,000,000		36,500,000		52,050,000		144,550,000		
				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan ****	Laporan	16	56,000,000	16	36,500,000	16	52,050,000	48	144,550,000		Biro Administrasi Pembangunan, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa **	%	100	398,280,000	100	382,940,000	100	395,160,000	100	1,176,380,000		
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***				398,280,000		382,940,000		395,160,000		1,176,380,000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa ***	%	100	398,280,000	100	382,940,000	100	395,160,000	100	1,176,380,000		
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				361,900,000		347,400,000		357,770,000		1,067,070,000		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa ****	Laporan	12	361,900,000	12	347,400,000	12	357,770,000	36	1,067,070,000		Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ****				36,380,000		35,540,000		37,390,000		109,310,000		
				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa ****	Laporan	12	36,380,000	12	35,540,000	12	37,390,000	36	109,310,000		Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum **	%	100	271,707,000	100	235,457,000	100	288,707,000	100	795,871,000		
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ***				1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000		
				Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum ***	%	100	1,000,000	100	1,000,000	100	1,000,000	100	3,000,000		
		X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan DBHCHT ****	Orang	800	1,000,000	900	1,000,000	1000	1,000,000	2700	3,000,000		OPD Provinsi; PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***				270,707,000		234,457,000		287,707,000		792,871,000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum ***	%	100	270,707,000	100	234,457,000	100	287,707,000	100	792,871,000		
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				230,000,000		200,000,000		250,000,000		680,000,000		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Hukum ****	Laporan	12	230,000,000	12	200,000,000	12	250,000,000	36	680,000,000		Biro Hukum, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ****				40,707,000		34,457,000		37,707,000		112,871,000		
				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Hukum ****	Laporan	12	40,707,000	12	34,457,000	12	37,707,000	36	112,871,000		Biro Hukum, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang **	%	100	455,000,000	100	342,000,000	100	476,000,000	100	1,273,000,000		
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ***				10,000,000		6,000,000		20,000,000		36,000,000		
				Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam ***	%	100	10,000,000	100	6,000,000	100	20,000,000	100	36,000,000		
		X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10,000,000		6,000,000		20,000,000		36,000,000		
				Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai ****	Orang	8000	10,000,000	8000	6,000,000	8000	20,000,000	24000	36,000,000		OPD Provinsi; PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***				445,000,000		336,000,000		456,000,000		1,237,000,000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang ***	%	100	445,000,000	100	336,000,000	100	456,000,000	100	1,237,000,000		
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				400,000,000		296,000,000		411,000,000		1,107,000,000		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan ****	Laporan	12	200,000,000	12	146,000,000	12	211,000,000	36	557,000,000		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA ****	Laporan	12	200,000,000	12	150,000,000	12	200,000,000	36	550,000,000		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, JAWA TENGAH; OPD Provinsi



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ****				45,000,000		40,000,000		45,000,000		130,000,000		
				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan ****	Laporan	12	20,000,000	12	20,000,000	11	20,000,000	35	60,000,000		Biro Infrastruktur dan SDA, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA ****	Laporan	12	25,000,000	12	20,000,000	12	25,000,000	36	70,000,000		Biro Infrastruktur dan SDA, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat **	%	100	485,759,000	100	495,000,000	100	485,759,000	100	1,466,518,000		
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***				485,759,000		495,000,000		485,759,000		1,466,518,000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat ***	%	100	485,759,000	100	495,000,000	100	485,759,000	100	1,466,518,000		
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				365,759,000		375,000,000		365,759,000		1,106,518,000		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat ****	Laporan	12	365,759,000	12	375,000,000	12	365,759,000	36	1,106,518,000		Biro Kesejahteraan Rakyat, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ****				120,000,000		120,000,000		120,000,000		360,000,000		
				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat ****	Laporan	12	120,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	36	360,000,000		Biro Kesejahteraan Rakyat, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi **	%	100	618,800,000	100	657,975,000	100	682,000,000	100	1,958,775,000		
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ***				226,500,000		239,000,000		247,000,000		712,500,000		
				Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi ***	%	100	226,500,000	100	239,000,000	100	247,000,000	100	712,500,000		
		X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ****												
				Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan ****	Paket	0	-	0	-	0	-	0	-		OPD Provinsi; Setda Prov. Jateng, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ****				163,000,000		172,000,000		177,000,000		512,000,000		
				Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian ****	Dokumen	4	163,000,000	4	172,000,000	4	177,000,000	12	512,000,000		Lingkup Sekda Pro. Jateng, JAWA TENGAH; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ****				63,500,000		67,000,000		70,000,000		200,500,000		
				Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ****	Orang	35	63,500,000	35	67,000,000	35	70,000,000	105	200,500,000		Lingkup Sekda Pro. Jateng, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***				392,300,000		418,975,000		435,000,000		1,246,275,000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi ***	%	100	392,300,000	100	418,975,000	100	435,000,000	100	1,246,275,000		
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				291,100,000		310,975,000		321,000,000		923,075,000		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi ****	Laporan	12	95,850,000	12	100,000,000	12	103,000,000	36	298,850,000		Asisten Administrasi Setda Prov. Jateng, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Organisasi ****	Laporan	12	195,250,000	12	210,975,000	12	218,000,000	36	624,225,000		Biro Organisasi, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ****				101,200,000		108,000,000		114,000,000		323,200,000		
				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi ****	Laporan	12	40,600,000	12	43,000,000	12	46,000,000	36	129,600,000		Asisten Administrasi Setda Prov. Jateng, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Organisasi ****	Laporan	12	60,600,000	12	65,000,000	12	68,000,000	36	193,600,000		Biro Organisasi, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten	%	100	677,000,000	100	585,000,000	100	935,000,000	100	2,197,000,000		
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***				677,000,000		585,000,000		935,000,000		2,197,000,000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten	%	100	677,000,000	100	585,000,000	100	935,000,000	100	2,197,000,000		
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				635,000,000		550,000,000		875,000,000		2,060,000,000		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ****	Laporan	12	240,000,000	12	200,000,000	12	350,000,000	36	790,000,000		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Jateng, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama ****	Laporan	12	395,000,000	12	350,000,000	12	525,000,000	36	1,270,000,000		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama, JAWA TENGAH; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ****				42,000,000		35,000,000		60,000,000		137,000,000		
				Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ****	Laporan	12	15,000,000	12	15,000,000	12	20,000,000	36	50,000,000		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Jateng, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama ****	Laporan	12	27,000,000	12	20,000,000	12	40,000,000	36	87,000,000		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian **	%	100	415,000,000	100	380,274,000	100	424,910,000	100	1,220,184,000		
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***				415,000,000		380,274,000		424,910,000		1,220,184,000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian ***	%	100	415,000,000	100	380,274,000	100	424,910,000	100	1,220,184,000		
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				385,000,000		355,274,000		392,910,000		1,133,184,000		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Perekonomian ****	Laporan	12	385,000,000	12	355,274,000	12	392,910,000	36	1,133,184,000		Biro Perekonomian, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ****				30,000,000		25,000,000		32,000,000		87,000,000		
				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Perekonomian ****	Laporan	12	30,000,000	12	25,000,000	12	32,000,000	36	87,000,000		Biro Perekonomian, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol **	%	100	22,402,600,000	100	19,852,723,000	100	26,260,000,000	100	68,515,323,000		
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***				78,100,000		71,000,000		100,000,000		249,100,000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol ***	%	100	78,100,000	100	71,000,000	100	100,000,000	100	249,100,000		
		X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****				39,600,000		36,000,000		50,000,000		125,600,000		
				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen	12	39,600,000	12	36,000,000	12	50,000,000	36	125,600,000		OPD Provinsi; Sekretariat Daerah Prov. Jateng, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ****				38,500,000		35,000,000		50,000,000		123,500,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah ****	Dokumen	4	38,500,000	4	35,000,000	4	50,000,000	12	123,500,000		OPD Provinsi; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan ***				20,735,000,000		18,336,723,000		24,200,000,000		63,271,723,000		
				Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan ***	Laporan	12	20,735,000,000	12	18,336,723,000	12	24,200,000,000	36	63,271,723,000		
		X.XX.01.1.13.01	Penyiapan Materi Pimpinan ****				330,000,000		300,000,000		500,000,000		1,130,000,000		
				Jumlah dokumen materi pimpinan yang disiapkan ****	Dokumen	12	330,000,000	12	300,000,000	12	500,000,000	36	1,130,000,000		OPD Provinsi; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan ****				17,325,000,000		15,236,723,000		20,000,000,000		52,561,723,000		
				Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan ****	Laporan	12	17,325,000,000	12	15,236,723,000	12	20,000,000,000	36	52,561,723,000		OPD Provinsi; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.13.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan ****				3,080,000,000		2,800,000,000		3,700,000,000		9,580,000,000		
				Jumlah laporan pengelolaan dokumentasi pimpinan ****	Laporan	12	3,080,000,000	12	2,800,000,000	12	3,700,000,000	36	9,580,000,000		
		X.XX.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolkan ***				1,589,500,000		1,445,000,000		1,960,000,000		4,994,500,000		
				Jumlah laporan fasilitasi keprotokolkan yang disusun ***	Laporan	12	1,589,500,000	12	1,445,000,000	12	1,960,000,000	36	4,994,500,000		
		X.XX.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara ****				1,479,500,000		1,345,000,000		1,800,000,000		4,624,500,000		
				Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara ****	Laporan	12	1,479,500,000	12	1,345,000,000	12	1,800,000,000	36	4,624,500,000		OPD Provinsi; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ****				88,000,000		80,000,000		110,000,000		278,000,000		
				Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah ****	Laporan	12	88,000,000	12	80,000,000	12	110,000,000	36	278,000,000		OPD Provinsi; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolkan ****				22,000,000		20,000,000		50,000,000		92,000,000		
				Jumlah laporan pengelolaan hubungan keprotokolkan ****	Laporan	12	22,000,000	12	20,000,000	12	50,000,000	36	92,000,000		OPD Provinsi; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda **	%	100	167,382,500,000	100	159,794,981,000	100	196,110,850,000	100	523,288,331,000		
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ***				87,924,553,000		87,886,332,000		101,369,839,000		277,180,724,000		
				Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ***	Laporan	12	87,924,553,000	12	87,886,332,000	12	101,369,839,000	36	277,180,724,000		
		X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ****				85,604,123,000		85,604,123,000		98,969,839,000		270,178,085,000		
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN ****	Bulan	12	85,604,123,000	12	85,604,123,000	12	98,969,839,000	36	270,178,085,000		OPD Provinsi; Sekretariat Daerah Prov. Jateng, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ****				1,900,000,000		1,900,000,000		1,900,000,000		5,700,000,000		
				Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN ****	Dokumen	12	1,900,000,000	12	1,900,000,000	12	1,900,000,000	36	5,700,000,000		OPD Provinsi; Sekretariat Daerah Prov. Jateng, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ****				337,930,000		307,209,000		400,000,000		1,045,139,000		
				Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah ****	Laporan	12	337,930,000	12	307,209,000	12	400,000,000	36	1,045,139,000		OPD Provinsi; Sekretariat Daerah Prov. Jateng, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ****				82,500,000		75,000,000		100,000,000		257,500,000		
				Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah ****	Laporan	12	82,500,000	12	75,000,000	12	100,000,000	36	257,500,000		OPD Provinsi; Sekretariat Daerah Prov. Jateng, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ***				635,250,000		577,500,000		800,000,000		2,012,750,000		
				Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ***	Laporan	12	635,250,000	12	577,500,000	12	800,000,000	36	2,012,750,000		
		X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ****				412,500,000		375,000,000		500,000,000		1,287,500,000		
				Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	12	412,500,000	12	375,000,000	12	500,000,000	36	1,287,500,000		OPD Provinsi; Sekretariat Daerah Prov. Jateng, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD ****				222,750,000		202,500,000		300,000,000		725,250,000		
				Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Laporan	12	222,750,000	12	202,500,000	12	300,000,000	36	725,250,000		OPD Provinsi; Sekretariat Daerah Prov. Jateng, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah ***				25,000,000		20,000,000		50,000,000		95,000,000		
				Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah ***	Laporan	12	25,000,000	12	20,000,000	12	50,000,000	36	95,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah ****				25,000,000		20,000,000		50,000,000		95,000,000		
				Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah ****	Laporan	12	25,000,000	12	20,000,000	12	50,000,000	36	95,000,000		OPD Provinsi; Sekretariat Daerah Prov. Jateng, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***				8,680,469,000		7,573,155,000		11,325,000,000		27,578,624,000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda ***	%	100	8,680,469,000	100	7,573,155,000	100	11,325,000,000	100	27,578,624,000		
		X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****				442,680,000		402,437,000		550,000,000		1,395,117,000		
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	12	442,680,000	12	402,437,000	12	550,000,000	36	1,395,117,000		OPD Provinsi; Sekretariat Daerah Prov. Jateng, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				550,789,000		500,718,000		700,000,000		1,751,507,000		
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	12	550,789,000	12	500,718,000	12	700,000,000	36	1,751,507,000		OPD Provinsi; Sekretariat Daerah Prov. Jateng, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				467,500,000		425,000,000		600,000,000		1,492,500,000		
				Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	12	467,500,000	12	425,000,000	12	600,000,000	36	1,492,500,000		OPD Provinsi; Sekretariat Daerah Prov. Jateng, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor ****				132,000,000		120,000,000		175,000,000		427,000,000		
				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan ****	Paket	12	132,000,000	12	120,000,000	12	175,000,000	36	427,000,000		OPD Provinsi; Sekretariat Daerah Prov. Jateng, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****				247,500,000		225,000,000		300,000,000		772,500,000		
				Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	12	247,500,000	12	225,000,000	12	300,000,000	36	772,500,000		OPD Provinsi; Sekretariat Daerah Prov. Jateng, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu ****				4,840,000,000		4,400,000,000		6,000,000,000		15,240,000,000		
				Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu ****	Laporan	12	4,840,000,000	12	4,400,000,000	12	6,000,000,000	36	15,240,000,000		OPD Provinsi; Provinsi Lain dan Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				2,000,000,000		1,500,000,000		3,000,000,000		6,500,000,000		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	12	2,000,000,000	12	1,500,000,000	12	3,000,000,000	36	6,500,000,000		OPD Provinsi; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ***				7,000,000,000		5,300,000,000		10,700,000,000		23,000,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ***	Paket	2	7,000,000,000	2	5,300,000,000	2	10,700,000,000	6	23,000,000,000		
		X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel ****				500,000,000		300,000,000		700,000,000		1,500,000,000		
				Jumlah paket mebel yang disediakan ****	Paket	2	500,000,000	2	300,000,000	2	700,000,000	6	1,500,000,000		OPD Provinsi; Setda Prov. Jateng, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				6,500,000,000		5,000,000,000		10,000,000,000		21,500,000,000		
				Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan ****	Unit	50	6,500,000,000	50	5,000,000,000	50	10,000,000,000	150	21,500,000,000		OPD Provinsi; Sekretariat Daerah Prov. Jateng, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya ****												
				Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan ****	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-		
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				25,459,334,000		23,531,213,000		28,000,000,000		76,990,547,000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda ***	Laporan	12	25,459,334,000	12	23,531,213,000	12	28,000,000,000	36	76,990,547,000		
		X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****				7,000,000,000		6,200,000,000		9,000,000,000		22,200,000,000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	12	7,000,000,000	12	6,200,000,000	12	9,000,000,000	36	22,200,000,000		OPD Provinsi; Setda Prov. Jateng, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				914,334,000		831,213,000		1,200,000,000		2,945,547,000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Laporan	12	914,334,000	12	831,213,000	12	1,200,000,000	36	2,945,547,000		OPD Provinsi; Setda Prov. Jateng, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****				17,545,000,000		16,500,000,000		17,800,000,000		51,845,000,000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	12	16,995,000,000	12	16,000,000,000	12	17,000,000,000	36	49,995,000,000		OPD Provinsi; Setda Prov. Jateng, JAWA TENGAH
				Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum ****	Laporan	12	220,000,000	12	200,000,000	12	300,000,000	36	720,000,000		OPD Provinsi; Setda Prov. Jateng, JAWA TENGAH
				Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah ****	Laporan	3	330,000,000	3	300,000,000	3	500,000,000	9	1,130,000,000		OPD Provinsi; Setda Prov. Jateng, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				9,797,500,000		7,775,000,000		13,600,000,000		31,172,500,000		
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit	833	9,797,500,000	833	7,775,000,000	833	13,600,000,000	2499	31,172,500,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ****				275,000,000		250,000,000		400,000,000		925,000,000		
				Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya ****	Unit	4	275,000,000	4	250,000,000	4	400,000,000	12	925,000,000		OPD Provinsi; Sekretariat Daerah Prov. Jateng, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****				2,500,000,000		2,000,000,000		4,000,000,000		8,500,000,000		
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit	182	2,500,000,000	182	2,000,000,000	182	4,000,000,000	546	8,500,000,000		OPD Provinsi; Sekretariat Daerah Prov. Jateng, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel ****				68,750,000		62,500,000		100,000,000		231,250,000		
				Jumlah mebel yang dipelihara ****	Unit	30	68,750,000	30	62,500,000	30	100,000,000	90	231,250,000		OPD Provinsi; Sekretariat Daerah Prov. Jateng, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				1,500,000,000		1,250,000,000		2,000,000,000		4,750,000,000		
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit	300	1,500,000,000	300	1,250,000,000	300	2,000,000,000	900	4,750,000,000		OPD Provinsi; Setda Prov. Jateng, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****				5,000,000,000		3,800,000,000		6,500,000,000		15,300,000,000		
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	17	5,000,000,000	17	3,800,000,000	17	6,500,000,000	51	15,300,000,000		OPD Provinsi; Sekretariat Daerah Prov. Jateng, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				453,750,000		412,500,000		600,000,000		1,466,250,000		
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	300	453,750,000	300	412,500,000	300	600,000,000	900	1,466,250,000		OPD Provinsi; Setda Prov. Jateng, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ***				27,860,394,000		27,131,781,000		30,266,011,000		85,258,186,000		
				Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda ***	%	100	27,860,394,000	100	27,131,781,000	100	30,266,011,000	100	85,258,186,000		
		X.XX.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ****				266,011,000		266,011,000		266,011,000		798,033,000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah ****	Orang	2	266,011,000	2	266,011,000	2	266,011,000	2	798,033,000		OPD Provinsi; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ****				27,594,383,000		26,865,770,000		30,000,000,000		84,460,153,000		
				Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah ****	Orang	2	27,594,383,000	2	26,865,770,000	2	30,000,000,000	2	84,460,153,000		OPD Provinsi; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
	Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah *						275,000,000		250,000,000		295,000,000		820,000,000	Sekretariat Daerah	
				Indeks Manajemen Risiko *	Angka	2.83	275,000,000	2.85	250,000,000	2.87	295,000,000	2.87	820,000,000	Sekretariat Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI **				275,000,000		250,000,000		295,000,000		820,000,000		
					%	90	275,000,000	90	250,000,000	90	295,000,000	90	820,000,000		
		X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ***	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah **			275,000,000		250,000,000		295,000,000		820,000,000		
				Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ***	%	100	275,000,000	100	250,000,000	100	295,000,000	100	820,000,000		
		X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ****				165,000,000		150,000,000		175,000,000		490,000,000		
				Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah ****	Dokumen	6	165,000,000	6	150,000,000	6	175,000,000	18	490,000,000		OPD Provinsi; SEKRETARIAT DAERAH, JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****				110,000,000		100,000,000		120,000,000		330,000,000		
				Jumlah laporan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah ****	Laporan	8	110,000,000	8	100,000,000	8	120,000,000	24	330,000,000		Biro-Biro Lingkup Setda, JAWA TENGAH; OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah							374,287,945,000		351,897,619,000		376,118,865,000		1,102,304,429,000	Sekretariat Daerah	
				Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	36.1		37.1		38.1		38.1		Sekretariat Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil *						374,287,945,000		351,897,619,000		376,118,865,000		1,102,304,429,000	Sekretariat Daerah	
				Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah *	%	80	5,598,200,000	80	5,517,525,000	80	6,139,000,000	80	17,254,725,000	Sekretariat Daerah	
		4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI **				2,631,200,000		2,766,025,000		2,878,000,000		8,275,225,000		
				Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB **	%	14.29	280,200,000	17.14	295,000,000	20	306,000,000	20	881,200,000		
		4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ***				280,200,000		295,000,000		306,000,000		881,200,000		
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota ***	Dokumen	3	280,200,000	3	295,000,000	3	306,000,000	9	881,200,000		
		4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ****				280,200,000		295,000,000		306,000,000		881,200,000		
				Jumlah Fasilitas dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota ****	Laporan	4	280,200,000	4	295,000,000	4	306,000,000	12	881,200,000		BIRO ORGANISASI; Kab/Kota Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya **	%	85.71	221,000,000	88.57	232,500,000	91.43	242,000,000	91.43	695,500,000		
		4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan ***				221,000,000		232,500,000		242,000,000		695,500,000		
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota ***	Dokumen	2	221,000,000	2	232,500,000	2	242,000,000	6	695,500,000		
		4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota ****				221,000,000		232,500,000		242,000,000		695,500,000		
				Jumlah Fasilitas Penataan Kelembagaan dan Pembinaan Kematangan Organisasi di Kabupaten/Kota ****	Laporan	4	221,000,000	4	232,500,000	4	242,000,000	12	695,500,000		BIRO ORGANISASI; Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A **	%	66.67	375,850,000	69.05	395,000,000	71.43	411,000,000	71.43	1,181,850,000		
		4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ***				375,850,000		395,000,000		411,000,000		1,181,850,000		
				Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya ***	Dokumen	2	375,850,000	2	395,000,000	2	411,000,000	6	1,181,850,000		
		4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ****				375,850,000		395,000,000		411,000,000		1,181,850,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Jumlah laporan hasil monev AKIP OPD dan Kab/Kota ****	Laporan	4	375,850,000	4	395,000,000	4	411,000,000	12	1,181,850,000		BIRO ORGANISASI; OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kab/Kota, JAWA TENGAH
				Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan **	%	90	432,850,000	92	455,000,000	94	474,000,000	94	1,361,850,000		
		4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ***				432,850,000		455,000,000		474,000,000		1,361,850,000		
				Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan ***	Dokumen	2	432,850,000	2	455,000,000	2	474,000,000	6	1,361,850,000		
		4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan ****				432,850,000		455,000,000		474,000,000		1,361,850,000		
				Jumlah Fasilitas Tatalaksana Pemerintahan ****	Laporan	4	432,850,000	4	455,000,000	4	474,000,000	12	1,361,850,000		BIRO ORGANISASI; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif **	%	89.8	250,500,000	91.84	263,025,000	93.88	276,000,000	93.88	789,525,000		
		4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan ***				250,500,000		263,025,000		276,000,000		789,525,000		
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota ***	Dokumen	1	250,500,000	1	263,025,000	1	276,000,000	3	789,525,000		
		4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan ****				250,500,000		263,025,000		276,000,000		789,525,000		
				Jumlah Fasilitas dan Pembinaan Analisis Jabatan OPD dan kab/kota ****	Laporan	4	250,500,000	4	263,025,000	4	276,000,000	12	789,525,000		BIRO ORGANISASI; OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kab/Kota Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A **	%	74	230,200,000	78	242,000,000	82	251,000,000	82	723,200,000		
		4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ***				230,200,000		242,000,000		251,000,000		723,200,000		
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD ***	Dokumen	2	230,200,000	2	242,000,000	2	251,000,000	6	723,200,000		
		4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ****				230,200,000		242,000,000		251,000,000		723,200,000		
				Jumlah Fasilitas dan Pembinaan Pelaksanaan RB di OPD ****	Laporan	4	230,200,000	4	242,000,000	4	251,000,000	12	723,200,000		BIRO ORGANISASI; OPD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi **	%	66	410,400,000	70	431,500,000	74	447,000,000	74	1,288,900,000		
		4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan ***				410,400,000		431,500,000		447,000,000		1,288,900,000		
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi ***	Dokumen	1	410,400,000	1	431,500,000	1	447,000,000	3	1,288,900,000		
		4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi ****				410,400,000		431,500,000		447,000,000		1,288,900,000		
				Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah ****	Laporan	4	230,000,000	4	241,500,000	4	250,000,000	12	721,500,000		BIRO ORGANISASI; OPD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Jumlah laporan koordinasi , fasilitasi dan asistensi peningkatan kematangan organisasi dan kebijakan perangkat daerah ****	Laporan	2	180,400,000	2	190,000,000	2	197,000,000	6	567,400,000		BIRO ORGANISASI; OPD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan **	%	88.73	430,200,000	91.01	452,000,000	93.86	471,000,000	93.86	1,353,200,000		
		4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ***				430,200,000		452,000,000		471,000,000		1,353,200,000		
				Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik ***	Dokumen	4	430,200,000	4	452,000,000	4	471,000,000	12	1,353,200,000		
		4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik ****				430,200,000		452,000,000		471,000,000		1,353,200,000		
				Jumlah Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik ****	Laporan	6	430,200,000	6	452,000,000	6	471,000,000	18	1,353,200,000		BIRO ORGANISASI; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN **				2,967,000,000		2,751,500,000		3,261,000,000		8,979,500,000		
				Persentase capaian pelaksanaan APBD **	%	98.7	702,000,000	98.8	642,000,000	98.85	786,000,000	98.85	2,130,000,000		
		4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah ***				702,000,000		642,000,000		786,000,000		2,130,000,000		
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD ***	Dokumen	4	442,000,000	4	406,000,000	4	503,000,000	12	1,351,000,000		
		4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD ****				442,000,000		406,000,000		503,000,000		1,351,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD ****	Laporan	12	442,000,000	12	406,000,000	12	503,000,000	36	1,351,000,000		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN; OPD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD ***	Dokumen	4	260,000,000	4	236,000,000	4	283,000,000	12	779,000,000		
		4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD ****				260,000,000		236,000,000		283,000,000		779,000,000		
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD ****	Laporan	12	260,000,000	12	236,000,000	12	283,000,000	36	779,000,000		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN; OPD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Persentase capaian pelaksanaan APBN **	%	95.5	430,000,000	95.5	416,500,000	95.5	489,000,000	95.5	1,335,500,000		
		4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah ***				430,000,000		416,500,000		489,000,000		1,335,500,000		
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN ***	Dokumen	4	430,000,000	4	416,500,000	4	489,000,000	12	1,335,500,000		
		4.01.08.1.01.02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN ****				430,000,000		416,500,000		489,000,000		1,335,500,000		
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN ****	Laporan	8	430,000,000	8	416,500,000	8	489,000,000	24	1,335,500,000		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN; OPD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah **	%	85	770,000,000	86	733,500,000	87	825,000,000	87	2,328,500,000		
		4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah ***				770,000,000		733,500,000		825,000,000		2,328,500,000		
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah ***	Dokumen	4	220,000,000	4	200,000,000	4	225,000,000	12	645,000,000		
		4.01.08.1.02.01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah ****				220,000,000		200,000,000		225,000,000		645,000,000		
				Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah ****	Dokumen	4	220,000,000	4	200,000,000	4	225,000,000	12	645,000,000		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN; OPD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap ***	%	91	550,000,000	92	533,500,000	93	600,000,000	93	1,683,500,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah ****				550,000,000		533,500,000		600,000,000		1,683,500,000		
				Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitas pelaporan pembangunan daerah ****	Dokumen	12	550,000,000	12	533,500,000	12	600,000,000	36	1,683,500,000		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN; OPD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Persentase realisasi bantuan keuangan **	%	85	955,000,000	85	856,500,000	85	1,051,000,000	85	2,862,500,000		
		4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah ***				955,000,000		856,500,000		1,051,000,000		2,862,500,000		
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I ***	Dokumen	8	320,000,000	8	290,000,000	8	353,000,000	24	963,000,000		
		4.01.08.1.01.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah ****				320,000,000		290,000,000		353,000,000		963,000,000		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil I ****	Dokumen	8	320,000,000	8	290,000,000	8	353,000,000	24	963,000,000		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN; Kab./Kota wilayah II, JAWA TENGAH
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II ***	Dokumen	8	320,000,000	8	290,000,000	8	353,000,000	24	963,000,000		
		4.01.08.1.01.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah ****				320,000,000		290,000,000		353,000,000		963,000,000		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil II ****	Dokumen	8	320,000,000	8	290,000,000	8	353,000,000	24	963,000,000		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN; Kab./Kota wilayah I, JAWA TENGAH
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III ***	Dokumen	8	315,000,000	8	276,500,000	8	345,000,000	24	936,500,000		
		4.01.08.1.01.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah ****				315,000,000		276,500,000		345,000,000		936,500,000		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil III ****	Dokumen	8	315,000,000	8	276,500,000	8	345,000,000	24	936,500,000		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN; Kab./Kota wilayah III, JAWA TENGAH
				Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasikan **	%	100	110,000,000	100	103,000,000	100	110,000,000	100	323,000,000		
		4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah ***				110,000,000		103,000,000		110,000,000		323,000,000		
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah ***	Dokumen	2	110,000,000	2	103,000,000	2	110,000,000	6	323,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.08.1.02.03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah ****				110,000,000		103,000,000		110,000,000		323,000,000		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah ****	Dokumen	2	110,000,000	2	103,000,000	2	110,000,000	6	323,000,000		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN; OPD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat *	%	90	357,958,025,000	90	337,140,034,000	90	358,806,025,000	90	1,053,904,084,000	Sekretariat Daerah	
		4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH **				3,895,000,000		3,150,000,000		4,700,000,000		11,745,000,000		
				Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti **	%	95	1,305,000,000	95	1,010,000,000	95	1,560,000,000	95	3,875,000,000		
		4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan ***				1,305,000,000		1,010,000,000		1,560,000,000		3,875,000,000		
				Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ ***	Dokumen	8	1,305,000,000	8	1,010,000,000	8	1,560,000,000	24	3,875,000,000		
		4.01.03.1.01.01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan ****				810,000,000		575,000,000		950,000,000		2,335,000,000		
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan ****	Dokumen	4	810,000,000	4	575,000,000	4	950,000,000	12	2,335,000,000		BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA; Provinsi Jawa Tengah, JAWA
		4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum ****				260,000,000		235,000,000		330,000,000		825,000,000		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum ****	Dokumen	4	260,000,000	4	235,000,000	4	330,000,000	12	825,000,000		BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA; Provinsi Jawa Tengah, JAWA
		4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah ****				235,000,000		200,000,000		280,000,000		715,000,000		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah ****	Dokumen	4	235,000,000	4	200,000,000	4	280,000,000	12	715,000,000		BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA; Provinsi Jawa Tengah, JAWA
				Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah **	%	95	1,260,000,000	95	950,000,000	95	1,480,000,000	95	3,690,000,000		
		4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah ***				1,260,000,000		950,000,000		1,480,000,000		3,690,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM ***	Dokumen	3	260,000,000	3	230,000,000	3	350,000,000	9	840,000,000		
		4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan ****				260,000,000		230,000,000		350,000,000		840,000,000		
				Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM ****	Dokumen	4	260,000,000	4	230,000,000	4	350,000,000	12	840,000,000		BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA; Provinsi Jawa Tengah, JAWA
				Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD ***	%	95	660,000,000	95	400,000,000	95	700,000,000	95	1,760,000,000		
		4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD ****				660,000,000		400,000,000		700,000,000		1,760,000,000		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD ****	Dokumen	45	660,000,000	45	400,000,000	25	700,000,000	115	1,760,000,000		BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA; Provinsi Jawa Tengah, JAWA
				Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan ***	%	100	340,000,000	100	320,000,000	100	430,000,000	100	1,090,000,000		
		4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan ****				340,000,000		320,000,000		430,000,000		1,090,000,000		
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan ****	Laporan	37	340,000,000	37	320,000,000	37	430,000,000	111	1,090,000,000		BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA; Provinsi
				Tingkat efektivitas kerjasama daerah **	%	95	1,330,000,000	95	1,190,000,000	95	1,660,000,000	95	4,180,000,000		
		4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah ***				1,330,000,000		1,190,000,000		1,660,000,000		4,180,000,000		
				Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti ***	%	95	640,000,000	95	580,000,000	95	800,000,000	95	2,020,000,000		
		4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah ****				640,000,000		580,000,000		800,000,000		2,020,000,000		
				Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah dalam negeri ****	Dokumen	9	520,000,000	10	480,000,000	11	600,000,000	30	1,600,000,000		BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA; Provinsi
				Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah luar negeri ****	Dokumen	5	120,000,000	6	100,000,000	7	200,000,000	18	420,000,000		BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA; Provinsi
				Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti ***	%	95	270,000,000	95	240,000,000	95	320,000,000	95	830,000,000		
		4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta ****				270,000,000		240,000,000		320,000,000		830,000,000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Dalam Negeri ****	Dokumen	6	140,000,000	7	120,000,000	8	170,000,000	21	430,000,000		BIRO PEMERINTAHAN,OTON OMI DAERAH DAN KERJA SAMA; Provinsi Jawa Tengah, JAWA
				Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Luar Negeri ****	Dokumen	4	130,000,000	5	120,000,000	6	150,000,000	15	400,000,000		BIRO PEMERINTAHAN,OTON OMI DAERAH DAN KERJA SAMA
				Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah ***	%	95	420,000,000	95	370,000,000	95	540,000,000	95	1,330,000,000		
		4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama ****				420,000,000		370,000,000		540,000,000		1,330,000,000		
				Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri yang Dievaluasi ****	Laporan	4	150,000,000	4	130,000,000	4	210,000,000	12	490,000,000		BIRO PEMERINTAHAN,OTON OMI DAERAH DAN KERJA SAMA
				Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Dievaluasi ****	Laporan	4	130,000,000	4	110,000,000	4	170,000,000	12	410,000,000		BIRO PEMERINTAHAN,OTON OMI DAERAH DAN KERJA SAMA
				Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri ****	%	100	140,000,000	100	130,000,000	100	160,000,000	100	430,000,000		BIRO PEMERINTAHAN,OTON OMI DAERAH DAN KERJA SAMA
		4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT **				349,881,025,000		329,871,784,000		349,881,025,000		1,029,633,834,000		
				Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar **	%	81	980,000,000	83	820,000,000	85	980,000,000	85	2,780,000,000		
		4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar ***				980,000,000		820,000,000		980,000,000		2,780,000,000		
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan ***	Dokumen	4	380,000,000	4	330,000,000	4	380,000,000	12	1,090,000,000		
		4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan ****				380,000,000		330,000,000		380,000,000		1,090,000,000		
				Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan ****	Dokumen	8	380,000,000	8	330,000,000	8	380,000,000	24	1,090,000,000		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT; OPD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan ***	Dokumen	4	310,000,000	4	240,000,000	4	310,000,000	12	860,000,000		
		4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan ****				310,000,000		240,000,000		310,000,000		860,000,000		
				Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan ****	Dokumen	8	310,000,000	8	240,000,000	8	310,000,000	24	860,000,000		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT; OPD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial ***	Dokumen	4	290,000,000	4	250,000,000	4	290,000,000	12	830,000,000		
		4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial ****				290,000,000		250,000,000		290,000,000		830,000,000		
				Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial ****	Dokumen	8	290,000,000	8	250,000,000	8	290,000,000	24	830,000,000		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT; OPD Provinsi Jawa tengah, JAWA TENGAH
				Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar **	%	82	1,229,500,000	84	1,229,500,000	85	1,229,500,000	85	3,688,500,000		
		4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar ***				1,229,500,000		1,229,500,000		1,229,500,000		3,688,500,000		
				Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan ***	Dokumen	4	300,000,000	4	300,000,000	4	300,000,000	12	900,000,000		
		4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Perpustakaan ****				300,000,000		300,000,000		300,000,000		900,000,000		
				Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan ****	Dokumen	8	300,000,000	8	300,000,000	8	300,000,000	24	900,000,000		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ***	Dokumen	4	627,000,000	4	627,000,000	4	627,000,000	12	1,881,000,000		
		4.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja ****				627,000,000		627,000,000		627,000,000		1,881,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Jumlah Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ****	Dokumen	8	627,000,000	8	627,000,000	8	627,000,000	24	1,881,000,000		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan ***	Dokumen	4	302,500,000	4	302,500,000	4	302,500,000	12	907,500,000		
		4.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja ****				302,500,000		302,500,000		302,500,000		907,500,000		
				Jumlah Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan ****	Dokumen	8	302,500,000	8	302,500,000	8	302,500,000	24	907,500,000		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik **	%	54	347,671,525,000	60	327,822,284,000	63	347,671,525,000	63	1,023,165,334,000		
		4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual ***				347,671,525,000		327,822,284,000		347,671,525,000		1,023,165,334,000		
				Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku ***	Dokumen	4	344,740,650,000	4	325,291,409,000	4	344,740,650,000	12	1,014,772,709,000		
		4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual ****				344,740,650,000		325,291,409,000		344,740,650,000		1,014,772,709,000		
				Jumlah fasilitas pelaksanaan hibah sarana prasarana keagamaan ****	Unit	750	344,740,650,000	800	325,291,409,000	850	344,740,650,000	2400	1,014,772,709,000		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan ***	Dokumen	4	2,930,875,000	4	2,530,875,000	4	2,930,875,000	12	8,392,625,000		
		4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual ****				2,930,875,000		2,530,875,000		2,930,875,000		8,392,625,000		
				Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji ****	Kegiatan	1	1,367,600,000	1	1,150,000,000	1	1,367,600,000	1	3,885,200,000		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan ****	Kegiatan	8	1,563,275,000	8	1,380,875,000	8	1,563,275,000	24	4,507,425,000		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM **				4,182,000,000		4,118,250,000		4,225,000,000		12,525,250,000		
				Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani **	%	96	1,425,000,000	96	1,356,250,000	96	1,430,000,000	96	4,211,250,000		
		4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum ***				1,425,000,000		1,356,250,000		1,430,000,000		4,211,250,000		
				Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara ***	Dokumen	12	1,425,000,000	12	1,356,250,000	12	1,430,000,000	36	4,211,250,000		
		4.01.05.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum ****				1,425,000,000		1,356,250,000		1,430,000,000		4,211,250,000		
				Jumlah Fasilitasi penanganan Perkara ****	Perkara	11	510,000,000	12	510,000,000	13	515,000,000	36	1,535,000,000		BIRO HUKUM; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu ****	Perkara	200	915,000,000	200	846,250,000	200	915,000,000	600	2,676,250,000		BIRO HUKUM; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Persentase kabupaten/kota peduli HAM **	%	96	535,000,000	96	535,000,000	96	535,000,000	96	1,605,000,000		
		4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum ***				535,000,000		535,000,000		535,000,000		1,605,000,000		
				Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ***	Dokumen	12	535,000,000	12	535,000,000	12	535,000,000	36	1,605,000,000		
		4.01.05.1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM ****				535,000,000		535,000,000		535,000,000		1,605,000,000		
				Jumlah dokumen kebijakan yang telah diharmonisasi berdasarkan perspektif HAM ****	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-		BIRO HUKUM; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Kabupaten/kota ****	Kabupaten/ Kota	35	235,000,000	35	235,000,000	35	235,000,000	105	705,000,000		BIRO HUKUM; Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH
				Jumlah Fasilitasi Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ****	Sengketa	7	300,000,000	7	300,000,000	7	300,000,000	21	900,000,000		BIRO HUKUM; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan **	%	96	1,377,000,000	97	1,408,250,000	97	1,422,000,000	97	4,207,250,000		
		4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan ***				1,377,000,000		1,408,250,000		1,422,000,000		4,207,250,000		
				Jumlah dokumen kajian produk hukum ***	Dokumen	12	635,000,000	12	575,000,000	12	570,000,000	36	1,780,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya ****				635,000,000		575,000,000		570,000,000		1,780,000,000		
				Jumlah dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya ****	Laporan	12	335,000,000	12	320,000,000	12	320,000,000	36	975,000,000		BIRO HUKUM; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Jumlah Pengkajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya ****	Laporan	12	300,000,000	12	255,000,000	12	250,000,000	36	805,000,000		BIRO HUKUM; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur ***	Dokumen	12	115,000,000	12	110,000,000	12	110,000,000	36	335,000,000		
		4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan ****				115,000,000		110,000,000		110,000,000		335,000,000		
				Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah ****	Laporan	12	115,000,000	12	110,000,000	12	110,000,000	36	335,000,000		BIRO HUKUM; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ***	Dokumen	12	627,000,000	12	723,250,000	12	742,000,000	36	2,092,250,000		
		4.01.05.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan ****				627,000,000		723,250,000		742,000,000		2,092,250,000		
				Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah ****	Laporan	12	250,000,000	12	273,250,000	12	300,000,000	36	823,250,000		BIRO HUKUM; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah ****	Laporan	12	377,000,000	12	450,000,000	12	442,000,000	36	1,269,000,000		BIRO HUKUM; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji **	%	96	845,000,000	96	818,750,000	96	838,000,000	96	2,501,750,000		
		4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan ***				845,000,000		818,750,000		838,000,000		2,501,750,000		
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum serta dokumen klarifikasi produk hukum Daerah Kabupaten/Kota ****	Dokumen	12	845,000,000	12	818,750,000	12	838,000,000	36	2,501,750,000		
		4.01.05.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota ****				845,000,000		818,750,000		838,000,000		2,501,750,000		
				Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I ****	Dokumen	105	275,000,000	115	265,000,000	125	270,000,000	345	810,000,000		BIRO HUKUM; Kab./kota Wilayah I, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Jumlah Fasilitas dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II ****	Dokumen	110	285,000,000	120	275,000,000	130	284,000,000	360	844,000,000		BIRO HUKUM; Kab./Kota Wilayah II, JAWA TENGAH
				Jumlah Fasilitas dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III ****	Dokumen	110	285,000,000	120	278,750,000	130	284,000,000	360	847,750,000		BIRO HUKUM; Kab./Kota Wilayah III, JAWA TENGAH
				Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa *	%	90	10,731,720,000	90	9,240,060,000	90	11,173,840,000	90	31,145,620,000	Sekretariat Daerah	
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN **				7,030,000,000		5,623,000,000		7,369,000,000		20,022,000,000		
				Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur **	%	85	811,000,000	85	526,000,000	85	822,000,000	85	2,159,000,000		
		4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam ***				811,000,000		526,000,000		822,000,000		2,159,000,000		
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ***	Dokumen	2	456,000,000	2	292,000,000	2	456,000,000	6	1,204,000,000		
		4.01.06.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air ****				456,000,000		292,000,000		456,000,000		1,204,000,000		
				Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ****	Laporan	4	456,000,000	4	292,000,000	4	456,000,000	12	1,204,000,000		BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ***	Dokumen	2	355,000,000	2	234,000,000	2	366,000,000	6	955,000,000		
		4.01.06.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air ****				355,000,000		234,000,000		366,000,000		955,000,000		
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ****	Laporan	4	355,000,000	4	234,000,000	4	366,000,000	12	955,000,000		BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan **	%	85	733,000,000	85	487,000,000	85	762,000,000	85	1,982,000,000		
		4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam ***				733,000,000		487,000,000		762,000,000		1,982,000,000		
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM ***	Dokumen	2	326,000,000	2	214,000,000	2	336,000,000	6	876,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.06.1.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup ****				326,000,000		214,000,000		336,000,000		876,000,000		
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM ****	Laporan	4	326,000,000	4	214,000,000	4	336,000,000	12	876,000,000		BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ***	Dokumen	2	407,000,000	2	273,000,000	2	426,000,000	6	1,106,000,000		
		4.01.06.1.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup ****				407,000,000		273,000,000		426,000,000		1,106,000,000		
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ****	Laporan	4	407,000,000	4	273,000,000	4	426,000,000	12	1,106,000,000		BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM; provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Persentase capaian kinerja program bidang pertanian **	%	87	901,000,000	87	595,000,000	87	940,000,000	87	2,436,000,000		
		4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam ***				901,000,000		595,000,000		940,000,000		2,436,000,000		
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan ****	Dokumen	2	238,000,000	2	156,000,000	2	246,000,000	6	640,000,000		
		4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan ****				238,000,000		156,000,000		246,000,000		640,000,000		
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan ****	Laporan	4	238,000,000	4	156,000,000	4	246,000,000	12	640,000,000		BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM; Provinsu Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan ***	Dokumen	2	263,000,000	2	175,000,000	2	276,000,000	6	714,000,000		
		4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan ****				263,000,000		175,000,000		276,000,000		714,000,000		
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan ****	Laporan	4	263,000,000	4	175,000,000	4	276,000,000	12	714,000,000		BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian ***	Dokumen	2	400,000,000	2	264,000,000	2	418,000,000	6	1,082,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan ****				400,000,000		264,000,000		418,000,000		1,082,000,000		
				Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DBHCHT ****	Laporan	2	50,000,000	2	4,000,000	2	18,000,000	2	72,000,000		BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian ****	Laporan	4	350,000,000	4	260,000,000	4	400,000,000	12	1,010,000,000		BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha **	%	81	325,000,000	82	325,000,000	83	390,000,000	83	1,040,000,000		
		4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD ***				325,000,000		325,000,000		390,000,000		1,040,000,000		
				Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka Usaha ***	Dokumen	2	325,000,000	2	325,000,000	2	390,000,000	6	1,040,000,000		
		4.01.06.1.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi ****				325,000,000		325,000,000		390,000,000		1,040,000,000		
				Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha ****	Laporan	4	325,000,000	4	325,000,000	4	390,000,000	12	1,040,000,000		BIRO PEREKONOMIAN; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan **	%	85	1,475,000,000	86	1,175,000,000	87	1,350,000,000	87	4,000,000,000		
		4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD ***				1,475,000,000		1,175,000,000		1,350,000,000		4,000,000,000		
				Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan ***	Dokumen	2	1,300,000,000	2	1,000,000,000	2	1,100,000,000	6	3,400,000,000		
		4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha ****				1,300,000,000		1,000,000,000		1,100,000,000		3,400,000,000		
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan ****	Laporan	4	1,300,000,000	4	1,000,000,000	4	1,100,000,000	12	3,400,000,000		BIRO PEREKONOMIAN; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan ***	Dokumen	2	175,000,000	2	175,000,000	2	250,000,000	6	600,000,000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.06.1.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMD dan Evaluasi Kebijakan ****				175,000,000		175,000,000		250,000,000		600,000,000		
				Jumlah Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD Jasa Keuangan ****	Laporan	4	175,000,000	4	175,000,000	4	250,000,000	12	600,000,000		BIRO PEREKONOMIAN; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Persentase nilai kemandirian BLUD **	%	55	150,000,000	56	150,000,000	57	160,000,000	57	460,000,000		
		4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD ***				150,000,000		150,000,000		160,000,000		460,000,000		
				Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD ***	Dokumen	2	75,000,000	2	75,000,000	2	80,000,000	6	230,000,000		
		4.01.06.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah ****				75,000,000		75,000,000		80,000,000		230,000,000		
				Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah ****	Laporan	2	75,000,000	2	75,000,000	2	80,000,000	6	230,000,000		BIRO PEREKONOMIAN; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD ***	Dokumen	2	75,000,000	2	75,000,000	2	80,000,000	6	230,000,000		
		4.01.06.1.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUD dan Evaluasi Kebijakan ****				75,000,000		75,000,000		80,000,000		230,000,000		
				Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pengembangan Badan Layanan Umum Daerah ****	Laporan	2	75,000,000	2	75,000,000	2	80,000,000	6	230,000,000		BIRO PEREKONOMIAN; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan **	%	83	785,000,000	84	815,000,000	85	1,020,000,000	85	2,620,000,000		
		4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian ***				785,000,000		815,000,000		1,020,000,000		2,620,000,000		
				Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan ***	Dokumen	4	350,000,000	4	400,000,000	4	500,000,000	12	1,250,000,000		
		4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro ****				350,000,000		400,000,000		500,000,000		1,250,000,000		
				Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perhubungan ****	Laporan	8	350,000,000	8	400,000,000	8	500,000,000	24	1,250,000,000		BIRO PEREKONOMIAN; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro ***	Dokumen	4	435,000,000	4	415,000,000	4	520,000,000	12	1,370,000,000		
		4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro ****				435,000,000		415,000,000		520,000,000		1,370,000,000		
				Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Makro ****	Laporan	8	435,000,000	8	415,000,000	8	520,000,000	24	1,370,000,000		BIRO PEREKONOMIAN; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan **	%	78	1,850,000,000	79	1,550,000,000	80	1,925,000,000	80	5,325,000,000		
		4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian ***				1,850,000,000		1,550,000,000		1,925,000,000		5,325,000,000		
				Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro ***	Dokumen	4	1,300,000,000	4	1,000,000,000	4	1,175,000,000	12	3,475,000,000		
		4.01.06.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro ****				1,300,000,000		1,000,000,000		1,175,000,000		3,475,000,000		
				Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Mikro ****	Laporan	8	1,300,000,000	8	1,000,000,000	8	1,175,000,000	24	3,475,000,000		BIRO PEREKONOMIAN; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Jumlah dokumen rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan ***	Dokumen	4	550,000,000	4	550,000,000	4	750,000,000	12	1,850,000,000		
		4.01.06.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro ****				550,000,000		550,000,000		750,000,000		1,850,000,000		
				Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perindustrian dan Perdagangan ****	Laporan	8	550,000,000	8	550,000,000	8	750,000,000	24	1,850,000,000		BIRO PEREKONOMIAN; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA **				3,701,720,000		3,617,060,000		3,804,840,000		11,123,620,000		
				Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa **	%	90	1,926,260,000	91	1,880,470,000	92	1,957,090,000	92	5,763,820,000		
		4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa ***				1,926,260,000		1,880,470,000		1,957,090,000		5,763,820,000		
				Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa ***	Laporan	4	1,926,260,000	4	1,880,470,000	4	1,957,090,000	12	5,763,820,000		
		4.01.07.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa ****				413,600,000		404,140,000		425,220,000		1,242,960,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Jumlah fasilitas perencanaan Strategi pengadaan barang/jasa ****	Laporan	4	213,600,000	4	214,140,000	4	215,220,000	12	642,960,000		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Jumlah Laporan Penyusunan SHB ****	Laporan	2	200,000,000	2	190,000,000	2	210,000,000	6	600,000,000		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa ****				1,186,480,000		1,157,620,000		1,196,610,000		3,540,710,000		
				Jumlah Laporan Fasilitas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pagu diatas 200 juta (non e purchasing) ****	Laporan	12	959,000,000	12	935,350,000	12	962,800,000	36	2,857,150,000		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog lokal ****	Laporan	4	227,480,000	4	222,270,000	4	233,810,000	12	683,560,000		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		4.01.07.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa ****				326,180,000		318,710,000		335,260,000		980,150,000		
				Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa ****	Laporan	4	326,180,000	4	318,710,000	4	335,260,000	12	980,150,000		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan	%	81	824,180,000	82	807,030,000	83	870,040,000	83	2,501,250,000		
		4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa ***				824,180,000		807,030,000		870,040,000		2,501,250,000		
				Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa ***	Laporan	4	824,180,000	4	807,030,000	4	870,040,000	12	2,501,250,000		
		4.01.07.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa ****				282,650,000		277,320,000		289,130,000		849,100,000		
				Jumlah Laporan pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa Provinsi Jawa Tengah ****	Laporan	2	282,650,000	2	277,320,000	2	289,130,000	6	849,100,000		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		4.01.07.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa ****				255,680,000		249,830,000		262,800,000		768,310,000		
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan UKPBJ ****	Laporan	4	255,680,000	4	249,830,000	4	262,800,000	12	768,310,000		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		4.01.07.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa ****				285,850,000		279,880,000		318,110,000		883,840,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025		2026		RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Jumlah Laporan pendampingan dan konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa ****	Laporan	4	285,850,000	4	279,880,000	4	318,110,000	12	883,840,000		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
				Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik **	%	80	951,280,000	82	929,560,000	85	977,710,000	85	2,858,550,000		
		4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik ***				951,280,000		929,560,000		977,710,000		2,858,550,000		
				Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa ***	Laporan	4	951,280,000	4	929,560,000	4	977,710,000	12	2,858,550,000		
		4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik ****				299,860,000		293,000,000		308,210,000		901,070,000		
				Jumlah Laporan fasilitasi sistem dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik ****	Laporan	4	299,860,000	4	293,000,000	4	308,210,000	12	901,070,000		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		4.01.07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa *****				465,300,000		454,650,000		478,200,000		1,398,150,000		
				Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa *****	Laporan	2	465,300,000	2	454,650,000	2	478,200,000	6	1,398,150,000		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		4.01.07.1.02.03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa ****				186,120,000		181,910,000		191,300,000		559,330,000		
				Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa ****	Laporan	4	186,120,000	4	181,910,000	4	191,300,000	12	559,330,000		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA; Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah ukuran atas keberhasilan yang dicapai oleh Sekretariat Daerah sesuai dengan bidang kewenangan yang penyelenggaraannya dibantu oleh sembilan Biro lingkup Sekretariat Daerah. Indikator Kinerja Utama menggambarkan tingkat capaian lingkup tujuan (Sekretariat Daerah) dan lingkup sasaran (Asisten Sekretariat Daerah). Untuk itu IKU harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah selesainya kegiatan. Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel 7.1 sebagai berikut.

**Tabel 7.1.**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Sekretariat Daerah**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		TARGET CAPAIAN			Kondisi Akhir	Keterangan
			2021	2022	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	Na	Na	36.1	37.1	38.1	38.1	<b>IKU</b>
2	Persentase capaian kinerja program OPD lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%	Na	Na	80	80	80	80	<b>IKU</b>
3	Persentase capaian kinerja program OPD lingkup Perekonomian dan Pelayanan PBJ	%	Na	Na	90	90	90	90	<b>IKU</b>
4	Persentase capaian kinerja program OPD lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	Na	Na	90	90	90	90	<b>IKU</b>

Keterangan:

- Na = merupakan indikator baru dan belum memiliki baseline

Indikator kinerja program pada Renstra Sekretariat Daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran Sekrtaeriat Daerah dalam RPD tahun 2024-2026. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dan memastikan agar setiap tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam RPD dapat dilaksanakan, sehingga terwujud keselarasan antara dokumen RPD dengan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Adapun Indikator kinerja program Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada target kinerja Tujuan dan Sasaran Sekrtaeriat Daerah dalam RPD Jawa Tengah Tahun 2024-2026 disajikan dalam Tabel 7.2 sebagai berikut.

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		TARGET CAPAIAN			Kondisi Akhir
			2021	2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>BIRO ADM. BANGDA</b>								
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	%	Na	100	100	100	100	100
2	Persentase realisasi bantuan keuangan	%	Na	83	85	85	85	85
3	Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	%	Na	80	85	86	87	87
4	Capaian Pelaksanaan APBD	%	Na	98	98.7	98.8	98.85	98.85
5	Capaian Pelaksanaan APBN	%	Na	95	95.5	95.5	95.5	95.5
6	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daera Biro Pembangunan Daerah	%	Na	Na	100	100	100	100
7	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	Na	Na	90	90	90	90
<b>BIRO HUKUM</b>								
8	Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	%	Na	95	96	96	96	96
9	Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	92	95	96	96	96	96
10	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji	%	92	Na	96	96	96	96
11	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	Na	95	96	97	97	97
12	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	%	Na	Na	100	100	100	100
<b>BIRO APBJ</b>								
13	Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan	%	Na	Na	81	82	83	83
14	Tingkat Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	%	Na	85	80	82	85	85
15	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%	Na	93	90	91	92	92
16	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro APBJ	%	Na	Na	100	100	100	100
<b>BIRO ISDA</b>								
17	Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%	Na	90	85	85	85	85
18	Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%	Na	95	85	85	85	85
19	Presentase capaian kinerja program bidang pertanian	%	Na	87	87	87	87	87
20	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	%	Na	Na	100	100	100	100



No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		TARGET CAPAIAN			Kondisi Akhir
			2021	2022	2024	2025	2026	
<b>BIRO KESRA</b>								
21	Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar	%	Na	90	81	83	85	85
22	Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar	%	Na	90	82	84	85	85
23	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	Na	40	54	60	63	63
24	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	%	Na	Na	100	100	100	100
<b>BIRO ORGANISASI</b>								
25	Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	%	Na	Na	14.29	17.14	20	20
26	Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A	%	Na	Na	74	78	82	82
27	Persentase Kabupaten/Kota yang Skor Kematangan Organisasinya dalam kategori tinggi	%	Na	77.14	85.71	88.57	91.43	91.43
28	Persentase Perangkat Daerah yang Skor Kematangan Organisasinya dalam kategori tinggi	%	Na	Na	66	70	74	74
29	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	78.59	81.58	90	92	94	94
30	Prosentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif	%	Na	Na	89.8	91.84	93.88	93.88
31	prosentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP A	%	Na	Na	66.67	69.05	71.43	71.43
32	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan Standar Pelayanan	%	34.59	73.65	88.73	91.01	93.86	93.86
33	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	Na	Na	100	100	100	100
<b>BIRO PEMOTDAKER</b>								
34	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklaniuti	%	Na	90	95	95	95	95
35	Tingkat Efektivitas kerjasama daerah	%	Na	90	95	95	95	95
36	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	Na	90	95	95	95	95
37	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	%	Na	Na	100	100	100	100
<b>BIRO PEREKONOMIAN</b>								
38	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	Na	80	83	84	85	85
39	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	Na	75	78	79	80	80
40	Persentase ketercapaian laba BUMD Aneka Usaha	%	Na	Na	81	82	83	83
41	Persentase ketercapaian laba BUMD Jasa Keuangan	%	Na	Na	85	86	87	87

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		TARGET CAPAIAN			Kondisi Akhir
			2021	2022	2024	2025	2026	
42	Nilai kemandirian BLUD	%	Na	50	55	56	57	57
43	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	%	Na	Na	100	100	100	100
<b>BIRO UMUM</b>								
44	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	Na	Na	100	100	100	100
45	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	Na	Na	100	100	100	100
46	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	Na	Na	100	100	100	100

Keterangan:

- Na = merupakan indikator baru dan belum memiliki baseline

## BAB VIII PENUTUP

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaras dengan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2024-2026 serta sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi penyelenggaraan urusan Sekretariat Daerah oleh Biro-Biro pada tahun 2024-2026 dalam mencapai Tujuan Sekretariat Daerah yaitu “Meningkatkan Kualitas Kebijakan” dan pedoman dalam penyusunan Renja Tahunan.

Penetapan pagu pendanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 dilakukan berdasarkan proyeksi yang diberikan oleh TAPD Provinsi Jawa Tengah. Pagu tersebut dimungkinkan mengalami perubahan dikarenakan ketersediaan anggaran belanja Provinsi Jawa Tengah. Oleh sebab itu, perlu kiranya penyusunan Renja Tahunan dilakukan dengan cermat agar sasaran pembangunan tetap dapat tercapai pada akhir masa periode Rencana Strategis pada tahun 2026. Dalam hal ketersediaan anggaran apabila tidak mencukupi, maka biro-biro lingkup Setda perlu menentukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dicapai. Inovasi pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi guna efisiensi pemanfaatan anggaran.

Kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.